LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II

Tahun 2022

BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Jl. Karangmenjangan No. 20 Surabaya - 60286
Telepom : 031-5020575, 5048833
email : bpom_surabaya@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, Reviu Renstra 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun selanjutnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan II pada tahun 2022 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis, hanya 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 5 sasaran strategis lainnya baru bisa dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM. Dari 6 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 4 sasaran strategis memperoleh capaian "BAIK" dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN". Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 99,04% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;
2. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan II tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
3. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan II tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 106,74% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;
5. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 106,54% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;
6. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 140,45% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan II dalam meningkatkan efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya;

7. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 104,17% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;
8. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal;
9. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal ;
10. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 130,17% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan II dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022 antara 89,47% sampai dengan 154,64%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" disebabkan karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan produk obat dan makanan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" sebesar 154,64%, hal ini disebabkan karena target yang terlalu rendah di triwulan II, sehingga akan dilakukan revisi target triwulan 3 dan 4.

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan tidak efisien (KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT dan Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM) dan 20 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,49 hingga 3,03 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.083.984.000,-. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 adalah Rp 21.186.948.313,- atau 37,78%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

Surabaya, 20 Juli 2022
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		**i**
Ikhtisar Eksekutif		**iii**
Daftar Isi		**vi**
Daftar Gambar		**vii**
Daftar Tabel		**viii**
BAB I. PENDAHULUAN		**1**
1.1.	*Latar Belakang*	*1*
1.2.	*Gambaran Umum Organisasi*	*2*
1.3.	*Struktur Organisasi*	*3*
1.4.	*Aspek Strategis Organisasi*	*5*
1.5.	*Analisis Lingkungan Strategis*	*6*
1.6.	*Isu Strategis*	*9*
BAB II. PERENCANAAN KINERJA		**15**
2.1.	*Rencana Strategis*	*15*
2.2.	*Rencana Kerja Tahun 2022*	*17*
2.3.	*Perjanjian Kinerja Tahun 2022*	*18*
2.4.	*Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)*	*20*
2.5.	*Metode Pengukuran*	*22*
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		**25**
3.1.	*Capaian Kinerja Organisasi*	*25*
3.2.	*Realisasi Anggaran*	*127*
3.3.	*Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*	*128*
BAB IV. PENUTUP		**131**
4.1	*Kesimpulan*	*131*
4.2	*Saran*	*133*
LAMPIRAN		**134**

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya 3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM 8
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur 8
Gambar 4. Visi dan Misi 15
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya 16
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator 22

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan 6
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya 17
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022 18
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022 20
Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 25
Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2022 26
Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022 28
Tabel 8. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel obat yang memenuhi syarat triwulan I dan II tahun 2022 29
Tabel 9. Perbandingan Realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 29
Tabel 10. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase obat yang memenuhi syarat 29
Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022 31
Tabel 12. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang memenuhi syarat triwulan I dan II tahun 2022 31
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022 32
Tabel 14. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat 33
Tabel 15. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga 33
Tabel 16. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I dan II tahun 2022 34
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 34
Tabel 18. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase obat yang aman dan bermutu 35
Tabel 19. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga 36
Tabel 20. Perbandingan realisasi dan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I dan II tahun 2022 37
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022 37
Tabel 22. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu 38
Tabel 23. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan II tahun 2022 38
Tabel 24. Perbandingan realisasi dan capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan I dan II tahun 2022 39
Tabel 25. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022 39
Tabel 26. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 40
Tabel 27. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan II tahun 2022 41

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 42
Tabel 29. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 45
Tabel 30. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 46
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 48
Tabel 32. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 49
Tabel 33. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 51
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 52
Tabel 35. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 54
Tabel 36. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan II tahun 2022 55
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 56
Tabel 38. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 57
Tabel 39. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi 58
Tabel 40. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I dan II tahun 2022 60
Tabel 41. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 60
Tabel 42. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi 61
Tabel 43. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan II tahun 2022 62
Tabel 44. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I dan II tahun 2022 63
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 63
Tabel 46. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 64
Tabel 47. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II tahun 2022 65
Tabel 48. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I dan II tahun 2022 66
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 66
Tabel 50. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 68
Tabel 51. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 71
Tabel 52. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I dan II tahun 2022 72
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 72
Tabel 54. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 73
Tabel 55. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 75

Tabel 56. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I dan II tahun 2022 76
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 76
Tabel 58. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 77
Tabel 59. Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan II tahun 2022 79
Tabel 60. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 80
Tabel 61. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik 82
Tabel 62. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisioanl dan kosmetik yang baik hingga triwulan II tahun 2022 83
Tabel 63. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik triwulan I dan II tahun 2022 84
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 85
Tabel 65. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik 86
Tabel 66. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 87
Tabel 67. Perbandingan realisasi dan capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I dan II tahun 2022 88
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 88
Tabel 69. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 90
Tabel 70. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan II tahun 2022 91
Tabel 71. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan I dan II tahun 2022 92
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 92
Tabel 73. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 94
Tabel 74. Jumlah desa pangan aman hingga triwulan II tahun 2022 95
Tabel 75. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah desa pangan aman triwulan I dan II tahun 2022 96
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan II Tahun 2022 dengan Target tahun 2022 96
Tabel 77. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Jumlah Desa Pangan Aman 98
Tabel 78. Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas hingga triwulan II tahun 2022 98
Tabel 79. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I dan II tahun 2022 99
Tabel 80. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 100
Tabel 81. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya 101
Tabel 82. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan II tahun 2022 101
Tabel 83. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I dan II tahun 2022 102
Tabel 84. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 103

Tabel 85. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 104
Tabel 86. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 105
Tabel 87. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I dan II tahun 2022 106
Tabel 88. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 106
Tabel 89. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 107
Tabel 90. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 108
Tabel 91. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I dan II tahun 2022 109
Tabel 92. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 109
Tabel 93. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 110
Tabel 94. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 112
Tabel 95. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya 113
Tabel 96. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya 114
Tabel 97. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 114
Tabel 98. Kategori Penilaian SAKIP 115
Tabel 99. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 115
Tabel 100. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 116
Tabel 101. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 117
Tabel 102. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 118
Tabel 103. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya 119
Tabel 104. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2022 119
Tabel 105. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022 120
Tabel 106. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 121
Tabel 107. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan II tahun 2022 121
Tabel 108. Perbandingan realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I dan II tahun 2022 123
Tabel 109. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022 123
Tabel 110. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal 124
Tabel 111. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 125
Tabel 112. Perbandingan realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I dan II tahun 2022 125
Tabel 113. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022 126
Tabel 114. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya 127
Tabel 115. Tingkat Efisiensi Kegiatan 129

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap

pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi

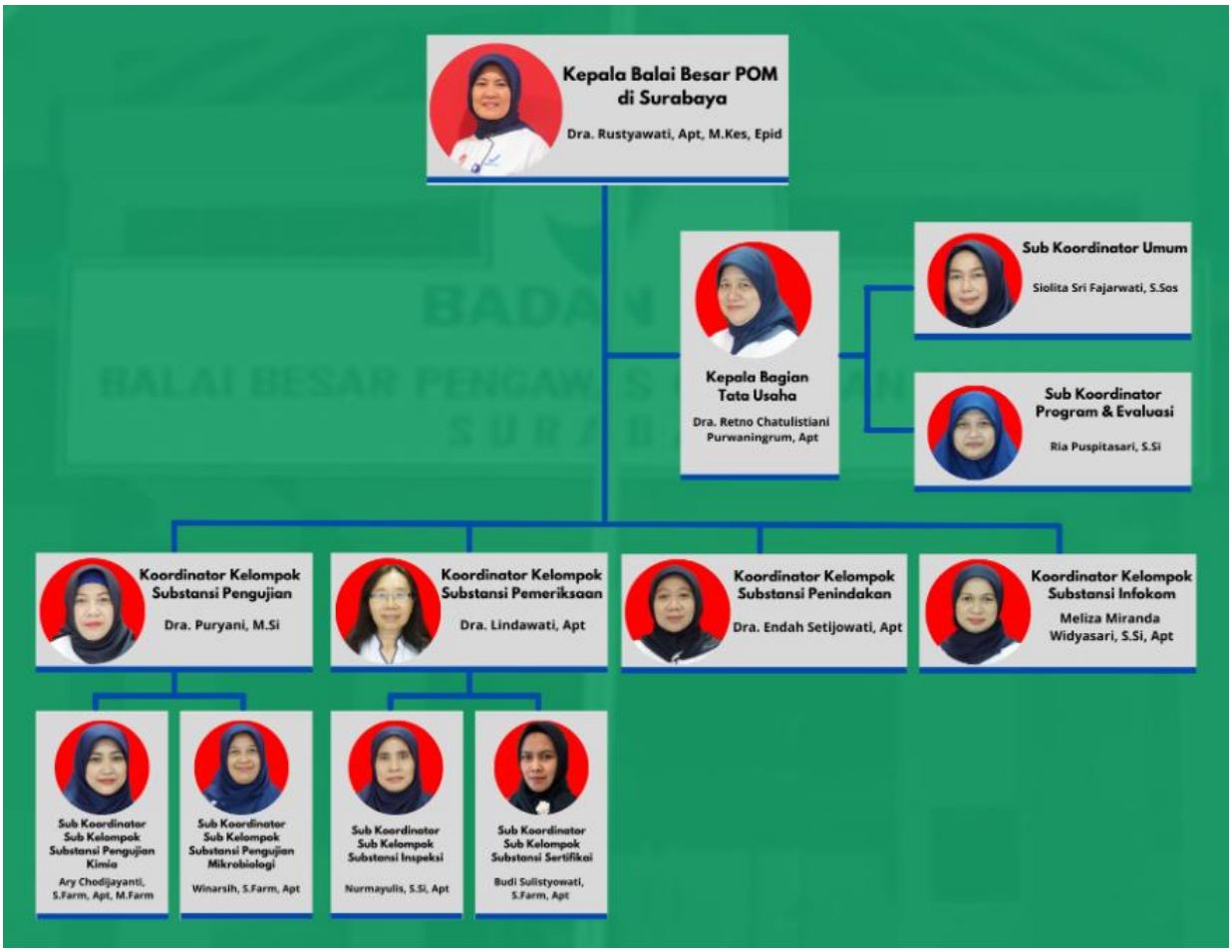

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan uraian fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

   Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

   a. Sub Kelompok Subtansi Inspeksi;
   b. Sub Kelompok Subtansi Sertifikasi; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.
4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
   b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
   c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
   d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
   e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
   f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
   g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
b. Subkelompok substansi umum; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi proaktif *control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan

dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektlitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 140 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	49	57	12	12

Sumber Daya Lainnya

a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m^2 dan luas bangunan 4.496,09 m^2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.3.687.444.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111^0 hingga $1114^04'$ Bujur Timur dan $7^012'$ hingga $8^048'$ Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km^2. Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya, Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini.

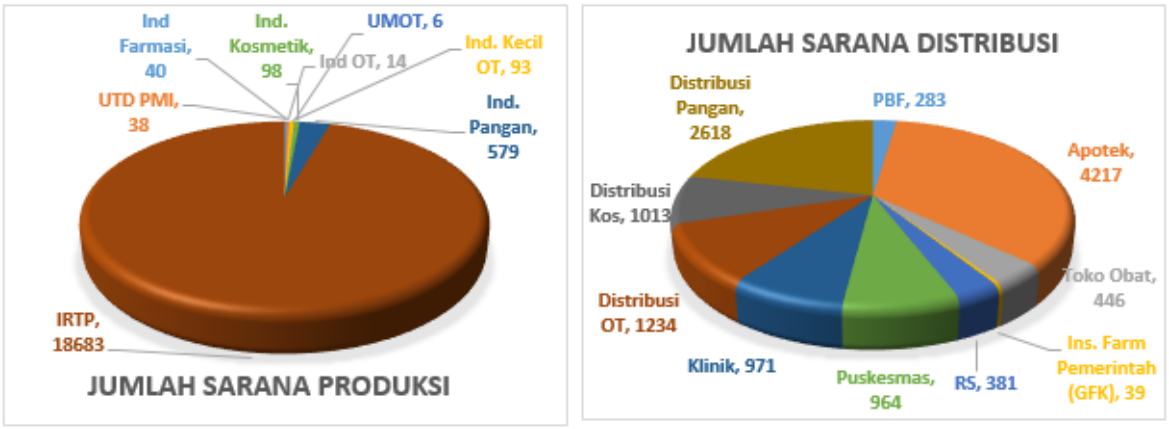

Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain: :

1. **Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa**

   Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

   Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

   BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

   Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online***

   Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal *(*tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa*).* Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. **Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

   Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. **Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

   Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

   Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. **Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya kembali mempersiapkan mengajukan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBBM telah diluncurkan 29 inovasi termasuk inovasi pelayanan publik antara lain GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) Jatim berupa pendampingan awal penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan fasilitasi pendaftaran pangan kepada UMKM pangan hingga produk pangan yang diproduksi mendapatkan ijin edar MD dari Badan POM; SURAMADU (Telusur Uji Pihak Ketiga Terpadu) yaitu layanan yang terdapat di website www.bbpomsurabaya.pom.go.id bagi pengguna layanan pengujian sampel Obat dan Makanan dari instansi lain, berupa informasi status proses penanganan sampel sejak diterima hingga diterbitkan sertifikat hasil uji; SERASI (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi) berupa Layanan yang terdapat di website www.bbpomsurabaya.pom.go.id bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tata cara pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi produk obat dan makanan di Badan POM berupa *QnA* dan video sosialisasi, layanan permintaan audit sarana produksi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya berupa status permohonan sejak diterima hingga keluar jadwal audit ke sarana. Pada akhir tahun 2021, BBPOM di Surabaya memperoleh kehormatan untuk mendapat piagam predikat WBBM secara langsung dari Menteri PAN dan RB di Jakarta. Hal ini menjadikan pemicu bagi BBPOM di Surabaya untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat integritas supaya dapat mempertahankan predikat WBBM yang telah diterima.

6. **Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan,

pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, *monitoring* tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan *monitoring* pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. **UMKM di Jawa Timur**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan konstribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program *One Pesantren One Product* (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantrenpreuner di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara siginfikan. Pada tahun pertama atau 2010,

jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. **Pandemi Covid-19 dan Laboratorium Uji Covid di BBPOM di Surabaya**

Pada 11 Maret 2021, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan corona virus *disease* 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/social distancing*, melakukan tes massal atau *rapid test* untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus *disease* 2021 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Seiring dengan semakin meningkatnya penderita Covid-19 di Indonesia, Badan POM merespon kebutuhan masyarakat dengan menunjuk beberapa Balai di seluruh Indonesia termasuk Balai Besar POM di Surabaya untuk menjadi laboratorium uji covid. Sejak tanggal 10 Nopember 2020 laboratorium BBPOM di Surabaya telah mendapat akun *new all record* untuk melaporkan hasil uji sampel covid-19 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan *tracing* pasien covid yang positif. Kapasitas uji Laboratorium BBPOM di Surabaya adalah 90 sampel per hari dan telah menerima sampel covid dari Dinkes Kabupaten Jember, Dinkes Kabupaten Banyuwangi, Dinkes Kabupaten Nganjuk, Dinkes Kabupaten Ponorogo, Dinkes Kabupaten Mojokerto, dan BBPOM di Denpasar dengan total 9.077 sampel hingga akhir tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :

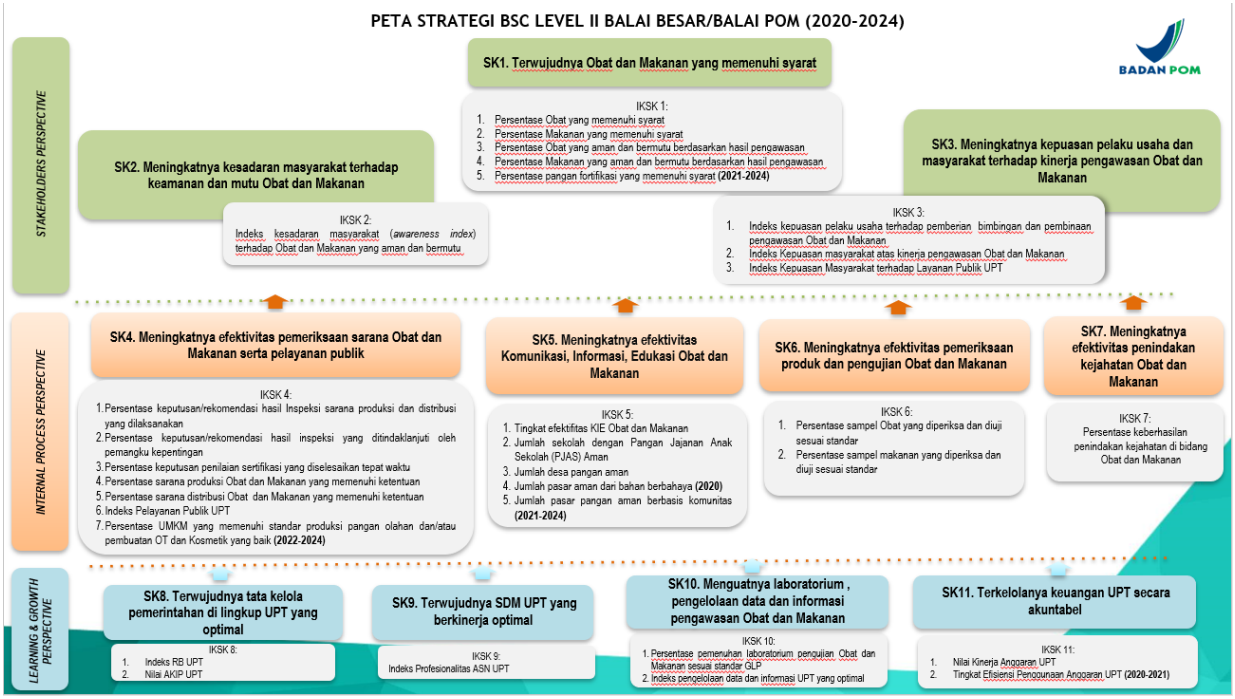

Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 29 indikator menjadi 30 indikator.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektIitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
5	Meningkatnya efektIitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektIitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektIitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Kegiatan :		Anggaran :
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		56.083.984.000

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-*monitoring* dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	626.084.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	299.032.800
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	156.521.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	154.047.200
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	73.957.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	260.000.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	(Rupiah)
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,7	180.260.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,09	350.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	111.519.000
4	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	48.860.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	468.944.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	870.278.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	473.668.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	876.011.000
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	111.519.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	*16*	*25*	*33*	*33*	*41*	*50*	*58*	*66*	*75*	*83*	*91*	60	390.696.000
5	Meningkatnya efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	8.561.400.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	*5*	*15*	*20*	*25*	*40*	*50*	*60*	*75*	*90*	*95*	76	785.661.000
		Jumlah desa pangan aman	-	*5*	*15*	*20*	*25*	*35*	*40*	*47.5*	*65*	*70*	*85*	28	1.195.660.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	*5*	*28*	*40*	*60*	*60*	*70*	*70*	*80*	*90*	*90*	18	604.499.000
6	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	5	13	21	29	37	47	57	67	77	87	100	782.605.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	8	17	27	36	43	53	63	73	83	93	100	453.080.000
7	Meningkatnya efektlitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	68	1.540.316.000
8	Terwujudnya tata kelola	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2	26.311.506.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	(Rupiah)
	pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,1	367.340.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,25	181.550.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	9.346.530.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	462.840.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	-	5	15	30	50	55	60	65	70	75	80	94	39.600.000

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

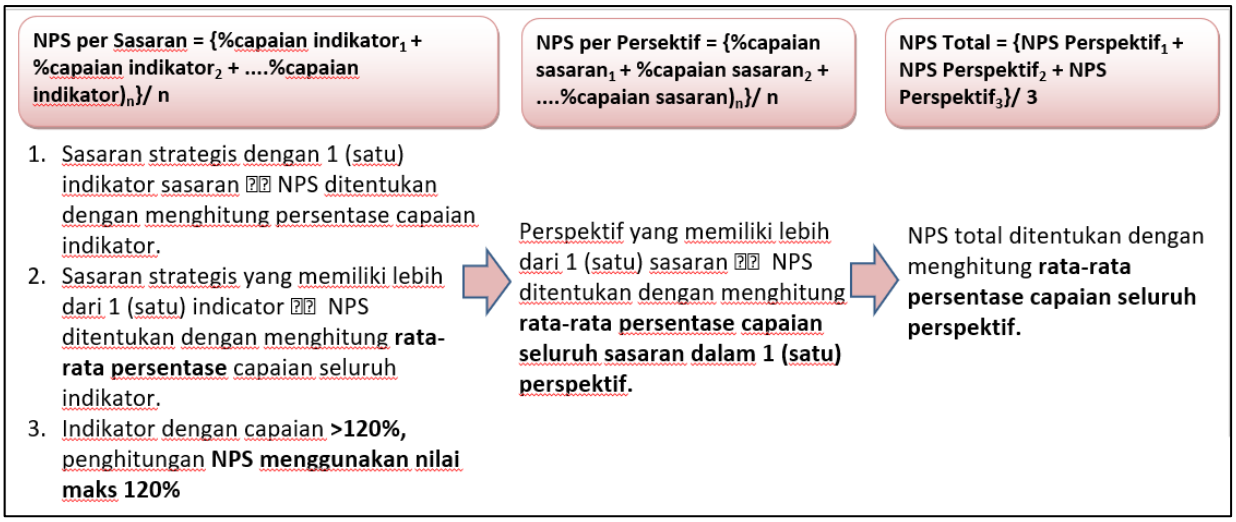

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performace*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II dan target akhir tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II dengan triwulan sebelumnya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2022, diperoleh nilai NPSS sementara sebesar 110,20% dengan kriteria BAIK, namun baru 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi. 5 sasaran strategis lainnya belum bisa dievaluasi, menunggu hasil penilaian dari pusat dan penilaian akhir tahun dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	99,04	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	106,74	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	106,54	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	140,45	Tidak dapat disimpulkan
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	104,17	Baik
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	130,17	Tidak dapat disimpulkan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TRIWULAN II 2022	REALISASI TRIWULAN II 2022	CAPAIAN TRIWULAN II 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	83,78	91,57
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	80,68	98,39
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,60	77,48	89,47
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	86,36	119,95
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	85,26	95,80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	95,68	105,14
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00	69,28	100,40
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,50	93,55	94,98
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	57,20	95,33
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62,00	65,00	104,84
		15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50,00	69,86	139,73

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TRIWULAN II 2022	REALISASI TRIWULAN II 2022	CAPAIAN TRIWULAN II 2022
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92	91,77	98,76
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40,00	40,01	100,03
		19	Jumlah desa pangan aman	35,00	41,67	119,06
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60,00	65,00	108,33
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37,00	57,22	154,64
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	43,00	54,29	126,27
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00	31,25	104,17
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Surabaya		-	-
		25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya		-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya		-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,50	2,60	104,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	55,00	71,60	130,17

Dari 20 (dua puluh) indikator yang dapat dievaluasi**,** terdapat **1 indikator** dengan kategori "**cukup**", 13 **indikator** mencapai target dengan kriteria "**baik**", 2 **indikator** dengan kategori "**sangat baik**", dan sebanyak **4 indikator** mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori "**tidak dapat disimpulkan**". Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target triwulan II tahun 2022 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	91.5	81.82	89,42	Cukup
Mei	91.5	82.28	89.93	Cukup
Juni	91.5	83.78	91.57	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat hingga triwulan II tahun 2022 adalah 83.78%, diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian 851 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 713 sampel MS (memenuhi syarat), 136 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan) dan 2 sampel Tanpa Izin Edar (TIE). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** yaitu 91.57 % dengan kriteria **baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 8. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel obat yang memenuhi syarat triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	80,23	87,69	Cukup
Triwulan II	83,78	91,57	Baik

Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan II mengalami peningkatan yaitu dari 80.23 % pada triwulan I menjadi 83.78 % di triwulan II, namun masih diperlukan upaya lagi peningkatan agar realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat memenuhi target yaitu 91.5%.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 9. Perbandingan Realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	91,5	83,78	91,57	Baik

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria **baik**. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan II tahun 2022 belum mencapai target dengan kritera baik. Hal ini disebabkan sampai bulan Juni 2022 sampel obat untuk komoditi obat kuasi tidak dilakukan sampling dan pengujian dikarenakan belum ada metode analisa untuk pengujian obat kuasi. Sampel obat yang disampling sampai triwulan II belum semuanya dilakukan pengujian. Sampel obat sebanyak 1079 masuk di laboratorium pengujian dan yang dilakukan pengujian.sebanyak 849 sampel. Sampel obat yang tidak memenuhi syarat sebanyak 138, terdiri dari 122 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan, 14 sampel Tidak Memenuhi Syarat Hasil Uji dan 2 sampel Tanpa Izin Edar.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 10. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase obat yang memenuhi syarat

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Belum dilakukan sampling untuk komoditi Obat Kuasi	• Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling	• Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling

Keterangan	April	Mei	Juni
	• Metode analisa untuk pengujian obat kuasi belum tersedia • Sampel obat yang disampling belum semuanya dilakukan pengujian • Sampel obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan memberikan kontribusi terbesar untuk sampel obat yang Tidak Memenuhi Syarat	• Belum tersedia Metode analisa untuk pengujian obat kuasi • Sampel obat yang disampling belum semuanya dilakukan pengujian Sampel obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan memberikan kontribusi terbesar untuk sampel obat yang Tidak Memenuhi Syarat	• Sampel obat yang disampling belum semuanya dilakukan pengujian • Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat, belum mencapai target pada triwulan II
Rekomendasi Perbaikan	• Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Percepatan pengujian sampel • Monev sampling dan pengujian • Pembinaan ke Pelaku Usaha terkait temuan Penandaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan	• Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling dan pengujian obat kuasi • Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Sosialisasi ke Petugas terkait surat dari Direktur Pengawasan Kosmetik perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik • Monev.sampling dan pengujian	• Melakukan koordinasi lebih intensif lagi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Penyamaan pengambilan kesimpulan TMK Penandaan Kosmetik bagi petugas sampling., khususnya temuan 2D Barcode • Monev.sampling dan pengujian • Sampling Obat Kuasi direncanakan TW III
Rencana Aksi	• Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Melakukan Monev Sampling dan Pengujian • Melakukan Pembinaan ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin sarana produksi • Melakukan Monev Persentase Obat yang memenuhi syarat	• Merencanakan sampling obat kuasi pada bulan Juni • Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Melakukan Monev Sampling dan Pengujian • Melakukan Sosialisasi ke Petugas terkait surat dari Direktur Pengawasan Kosmetik perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik	• Melakukan koordinasi lebih intensif lagi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Temuan 2D Barcode yang tidak dicantumkan pada label sampel kosmetik dikategorikan MK • Melakukan Monev Sampling dan Pengujian • Melakukan penjadwalan ualng untuk sampling obat kuasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Belum ada kegiatan sampling dan pengujian obat kuasi • Belum semua sampel obat yang masuk di laboratorium dilakukan pengujian • Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan bertambah banyak	• Belum ada kegiatan sampling dan pengujian obat kuasi • Belum semua sampel obat yang masuk di laboratorium dilakukan pengujian • Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan bertambah banyak	• Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling • Belum semua sampel obat yang masuk di laboratorium dilakukan pengujian • Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan bertambah banyak
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei • %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Mei 89.93% • Sampling Obat Kuasi direncanakan bulan Mei	Kondisi Juni • %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Juni 91.57% • Sampling Obat Kuasi direncanakan bulan Juni	Kondisi Juli -

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	82	85,31	104,03	Baik
Mei	82	83,68	102,05	Baik
Juni	82	80,68	98,39	Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ \textbf{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}}\ \textbf{x 100\%}$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 adalah 80,68%. Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat di triwulan I **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 98,39% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 12. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang memenuhi syarat triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	87,50	106,71	Baik
Triwulan II	80,68	98,39	Baik

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan II turun dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan meningkatnya hasil uji sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pada triwulan II sebanyak 19,32% sedangkan pada triwulan I sampel TMS sebanyak 2,4%. Meskipun demikian, capaian triwulan I dan II masuk kriteria **baik**.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	82	80,68	98,39	Baik

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat hingga triwulan II tahun 2022 belum **mencapai** target tahun 2022 namun masuk kriteria baik. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target di akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat hingga triwulan II tahun 2022 belum mencapai target dengan kritera baik . Hal ini disebabkan belum semua sampel yang masuk di triwulan II dilakukan pengujian. Dari 393 sampel yang masuk hingga triwulan II sebanyak 352 sampel dilakukan pengujian dengan hasil 284 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan sebanyak 68 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terdiri dari 9 sampel TMS pengujian, dan 49 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan.

TMS hasil uji sebagian besar merupakan produk PIRT dengan hasil TMS mikrobiologi dan TMS kimia berupa penggunaan pengawet yg melebihi batas maksimal dan penggunaan pemanis yg dilarang. TMK penandaan ditemukan pada produk MD, ML maupun PIRT karena label tersebut tidak sesuai dengan disetujui (klaim, tidak lengkap pelabelan, misalnya tidak mencantumkan kode produksi, tgl kadaluwarsa).

Besarnya jumlah sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan mengindikasikan perlunya pembinaan lebih intensif kepada pelaku usaha supaya dapat menerapkan semua ketentuan penandaan label pada produk. Selain itu juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait dalam pengawasan produksi dan peredaran produk PIRT melalui pemeriksaan Bersama

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 14. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Terdapat pergeseran jumlah sampling Acak. Harusnya ada sampling bumbu sebanyak 42 sampel namun diundur di bulan Mei oleh BBPOM di Mataram sehingga kategori pangan 4 (63 sampel) di bulan Mei maju ke bulan April, jadi target sampel acak 61 sampel menjadi 82 sampel • Sisa Sampel yang belum diuji dari TW I sebanyak 82	• Sisa sampel yang belum diuji bulan April 73 • Adanya SE terkait Pengujian CO2 pada minuman berkarbonasi sehingga disampling 10 sampel Minuman Berkarbonasi	• Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji dan Realisasi Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat belum tercapai
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sisa sampel dan sampel sampling bulan April	Percepatan pengujian sisa sampel dan sampel sampling bulan Mei	Percepatan pengujian sisa sampel
Rencana Aksi	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat • Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 82 sampel
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 104,03%	Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 102,05%	Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 98,39 %
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei • Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 102,05 %	Kondisi Juni • Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 98,39 %	Kondisi Juli -

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 15. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	86,6	75,32	86,97	Cukup
Mei	86,6	76,50	88,34	Cukup
Juni	86,6	77,48	89,47	Cukup

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\%\ \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan

kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu hingga triwulan II, diperoleh dari hasil pemeriksaan 262 sampel targeted obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 203 sampel MS (memenuhi syarat) dan 59 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang aman dan bermutu pada triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** yaitu 89,47 % dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 16. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	75,81	87,54	Cukup
Triwulan II	77,48	89,47	Cukup

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II mengalami peningkatan sebesar 1,67 % dari triwulan I, namun masih diperlukan upaya peningkatan lagi karena belum mencapai target dengan kriteria cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6	77,48	89,47	Cukup

Realisasi Persentase Obat Yang aman dan Bermutu hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria Cukup. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu pada triwulan II tahun 2022 belum mencapai target dengan kritera cukup . Hal ini disebabkan Sampel obat yang disampling di triwulan 2 sebanyak 352 sampel, sedangkan yang telah dilakukan pengujian sebanyak 262 sampel dengan hasil 203 sampel Memenuhi Syarat dan 59 sampel Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan). Adanya perbedaan klaim MK dan TMK penandaan antara petugas balai dan pusat. Sampel obat kuasi belum dilakukan sampling dan pengujian di triwulan I. Obat kuasi direncanakan sampling dan pengujian pada triwulan 2 dikarenakan menunggu metode pengujian dari PPPOMN.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 18. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase obat yang aman dan bermutu

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Masih banyak di temukan dipasaaran sampel kosmetik yang belum mencantumkan 2d barcode mengakibatkan hasil sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan juga bertambah • Masih banyaknya sampel obat tradisional yang tidak mencantumkan pada label kode produksi dan alamat perusahaan	• Masih banyak di temukan dipasaaran sampel kosmetik yang belum mencantumkan 2d barcode sehingga hasil sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan juga bertambah Masih banyaknya sampel obat tradisional yang tidak mencantumkan pada label kode produksi dan alamat perusahaan	Terjadi peningkatan realisasi pada TW 2 jika dibandingkan dengan realisasi pada TW 1 sebesar 1,67 %
Rekomendasi Perbaikan	• Monev Persentase Obat yang aman dan bermutu lebih ditingkatkan • Pembinaan ke pelaku usaha untuk terkait peraturan tentang penandaan /label sesuai peratufran yang berlaku	• Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling dan pengujian obat kuasi • Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Adanya surat dari Badan Pom tentang pengumuman penandaan untuk sampel kosmetik, yang mana me	• Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi
Rencana Aksi	• Monev Persentase Obat yang memenuhi syarat	• Merencanakan sampling obat kuasi pada triwulan 2 • Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi	• Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi • Melakukan pembinaan kepelaku usaha untuk mentaati peraturan tentang label yang telah mendapat persetujuan Badan POM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Masih banyaknya sampel yg tidak memenuhi ketentuan penandaannya	• Masih banyaknya sampel yg tidak memenuhi ketentuan penandaannya	• Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi April Berkurangnya sampel kosmetik yang TMK Penandaan	Kondisi Mei Berkurangnya sampel yang TMK Penandaan	Kondisi Juni Rencana sampling obat kuasi TW.3 Adanya peningkatan realisasi pada TW 2, karena berkurangnya sampel kosmetik yang TMK

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 19. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II Tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	72	96,67	134,36	Tidak dapat disimpulkan
Mei	72	85,37	118,56	Sangat Baik
Juni	72	86,36	119,95	Sangat Baik

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\%\ \textbf{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}}\ \textbf{x}\ 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 44 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 38 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 6 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di triwulan II tahun 2022 sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 119,95 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 20. Perbandingan realisasi dan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	100,00	138,89	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II	86,36	119,95	Sangat Baik

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan II turun dibandingkan dengan triwulan II namun masih dalam kategori Sangat Baik. Terdapat penambahan sampel PJAS dan sampel kasus rutin yang tidak memenuhi syarat sehingga menurunkan realisasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	86,36	119,95	Sangat Baik

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga triwulan I tahun 2022 telah **mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **sangat baik**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Makanan Yang Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan II tahun 2022 yang sudah melampaui target. Sampel Targeted Pangan menurut Pedoman Sampling tahun 2022 terdiri dari 95 sampel yaitu sampel PJAS sebanyak 76, sampel kemasan pangan sebanyak 6, DNA Babi, Laboratorium Air. Sampai TW II sampel PJAS yang masuk pengujian sebanyak 56 sampel dan yang dilakukan pengujian baru dengan hasil 38 MS (Memenuhi Syarat) dan masih 6 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sisa sampel yang belum diuji ada 12 sampel.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 22. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu

Keterangan	April	Mei	Maret
Kendala/ Permasalahan	• Sampling PJAS di minggu III bulan Maret dimasukkan di bulan April • Adanya surat edaran untuk melakukan sampling Kinder Joy dan Kemasan Galon • Hasil Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu melebihi target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan	• Adanya sampel kasus Ikan Asin dan Es Batu Tube	• Hanya ada sampel UMKM sebanyak 9 sampel • Terdapat sisa sampel 12 yang belum dilakukan pengujian
Rekomendasi Perbaikan	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu setiap bulan	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu setiap bulan	• Percepatan pengujian sisa sampel di bulan Juli
Rencana Aksi	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu setiap bulan	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu setiap bulan	• Melakukan Monev terhadap Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu dilakukan setiap bulan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan 96,67% dengan capaian 134,36%	• Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 85,37%	• Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 86,36%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei • Realisasi Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan 85,37% dengan capaian 118,56%	Kondisi Juni • Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 86,36dengan capaian 118,56%	Kondisi Juli -

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 23. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	89	81,33	91,39	Baik
Mei	89	85,26	95,80	Baik
Juni	89	85,26	95,80	Baik

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ \text{Pangan Fortifkasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai

dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan II diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 95 sampel fortifikasi pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 81 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 14 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 95,80 % dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 24. Perbandingan realisasi dan capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	81,33	91,39	Baik
Triwulan II	85,26	95,80	Baik

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat di triwulan II meningkat dibangdingkan dengan triwulan I dikarenakan sampel yang masuk di triwulan II adalah sampel minyak goreng yang hasil pengujiannya MS (Memenuhi Syarat) semua.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 25. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	85,26	95,80	Baik

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 meskipun dengan kriteria Baik. Perlu monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sampel Pangan Fortifikasi terdiri dari Garam Konsumsi Beryodium, Minyak Goreng dan Tepung Terigu. Sampling yang dilakukan hingga TW II adalah minyak goring sawit sebanyak 40 sampel. Total sampling sampai dengan TW 2 sebanyak 115 sampel . Sebanyak 95 sampel dilakukan pengujian dengan hasil 81 MS (Memenuhi Syarat) dan 14 TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 26. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Belum dilakukan pengujian terhadap Sampling Pangan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit sebanyak 20 sampel	• Sampling tepung terigu 10 sampel tidak bisa dilaksanakan karena dari Balai Spesifik ada kekurangan reagen dan Balai Surabaya ada kerusakan alat ICP.	• Belum dilakukan pengujian terhadap Sampling Pangan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit sebanyak 20 sampel • Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat sudah masuk kriteria Baik meskipun kurang dari target
Rekomendasi Perbaikan	• Percepatan Pengujian sampel minyak goreng sawit sebanyak 20 sampel	• Terkait Reagen dan alat ICP yang rusak direncanakan sampling Tepung Terigu dilaksanakan pada bulan Agustus	• Monitoring indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat setiap bulan
Rencana Aksi	• Monev terhadap Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	• Monev terhadap sampel Pangan Fortifikasi yang belum diuji beserta penandaannya	• Meningkatkan Monev Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat setiap bulan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 81,33%	• Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 85,26%%	• Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 85,26%% dengan Capaian 95,80%%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 85,26%	• Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 85,26%% dengan Capaian 95,80%	Kondisi Juli -

Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 27. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Indeks Kesadaran masyarakat awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:
$\bar{R}_a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.
b adalah bobot penduduk (BPS)
c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat

dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Hingga triwulan II tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2022.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Belum ada realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan II tahun 2022 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79	-	-	-

Belum ada realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan I tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil survey kesadaran (awareness) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021 didapatkan bahwa indeks pengetahuan adalah 74,53; indeks sikap 77,13 dan indeks perilaku adalah 68,42. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 79,26 (Baik); Obat Tradisional 75,51 (Baik); Suplemen Kesehatan 76,30 (Baik); Kosmetik 76,88 (Baik); Pangan Olahan 77,64 (Baik).

Dari hasil survey diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai pengetahuan yang baik terhadap petunjuk penyimpanan dan tanggal kadaluwarsa produk Obat dan Makanan, namun

pengetahuan tentang produk yang tidak terdaftar masih sangat rendah. Secara umum masyarakat telah memiliki sikap yang sangat baik terhadap kemasan yang masih bagus, efek samping, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan, terdaftar di BPOM dan mengetahui tanggal kadaluwarsa. Perilaku masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan terhadap aspek membeli produk dengan kemasan baik, membaca informasi label/kemasan produk, mengginakan produk sesuai dengan aturan pakai, menyimpan produk sesuai informasi pada label, dan membaca informasi kadaluwarsa, namun terjadi penurunan perilaku masyarakat dalam membeli produk yang terdaftar di BPOM (mempunyai NIE).

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 80,40 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 73,70. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Selama Triwulan II tahun 2022 BBPOM Surabaya tetap melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat di 14 titik yaitu di Banyuwangi, Situbondo, Bojonegoro, dan Surabaya yang diikuti oleh kurang lebih 3100 orang. Selain KIE bersama Tokoh

Masyarakat Anggota DPR RI, BBPOM Surabaya juga melaksanakan kegiatan KIE bersama instansi lain atau Perguruan Tinggi misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Peterenakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Perguruan Tinggi misalnya Universitas Airlangga dan Universitas Darrusallam Gontor. Selama Triwulan I tahun 2022 telah dilakukan 22 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, Pelatihan DFI, Pendampingan UMKM, dll.

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Surabaya harus merubah strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media social menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Selama triwulan I tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 1.187 layanan melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Selama masa PPKM masyarakat sudah beberapa kali menghubungi ULPK BBPOM di Surabaya agar diijinkan berkonsultasi secara langsung dan layanan secara langsung telah dilakukan secara full sejak bulan Maret 2022. Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan namun dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama triwulan II tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 5 kali yang diikuti oleh 206 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, DPW BMWI Jawa Timur. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Pangan Olahan versi Baru, IP CPPOB melalui e sertifikasi dan lain lain.

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial ini secara maksimal sekaitan dengan larangan tatap muka selama pandemic dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama Triwulan II tahun 2022 BBPOM Surabaya telah menayangkan 327 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor. Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik

sebanyak 7 kali selama triwulan II tahun 2022 yaitu melalui 10.000 sms flash di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Malang dengan topik : Cek Klik Lebaran. 6000 SMS Flash di wilayah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan dengan topik Layanan Publik. 2000 SMS flash di wilayah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan dengan topik : Gerakan Anti Narkoba. Billboard di Jombang dengan topik: Cek Klik & yanblik. 6000 SMS flash di wilayah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan topik Layanan Publik. 2000 SMS flash di wilayah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan dengan topik : Gerakan Anti Narkoba. Juga memasang Billboard di Kabupaten Jombang dengan topik: Cek Klik & yanblik.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic covid 19. Pada Triwulan II tahun 2022, BBPOM Surabaya telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Surabaya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM Surabaya diharapkan menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Surabaya.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 29. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Pelaksanaan KIE terkonsentrasi di wilayah wilayah sesuai dengan daerah pemilihan tokoh masyarakat anggota DPR RI, belum merata ke seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya.	Pelaksanaan KIE terkendala libur lebaran.	Bulan Juni pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu (Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan PJAS Aman). Terbatasnya jumlah SDM di Infokom. Pada saat pelaksanaan KIE hampir semua SDM bertugas di kegiatan KIE, padahal layanan ULPK tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh ada kekosongan layanan.
Rekomendasi/Perbaikan	Agar memanfaatkan Media Sosial yang dimiliki BBPOM Surabaya dan instansi lain untuk menyebarluaskan informasi tentang Obat dan Makanan.	Akan melaksanakan KIE melalui media dan metode yang lain misalnya media sosial, zoom meeting, melibatkan komunitas komunitas masyarakat, dll.	Akan melaksanakan KIE melalui media dan metode yang lain misalnya media sosial, zoom meeting, melibatkan komunitas komunitas masyarakat, dll. Melibatkan/meminta bantuan SDM dari Bagian/Kelompok substansi lain sehingga semua kegaitan dapat

Keterangan	April	Mei	Juni
			terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan.
Rencana Aksi	Membuat jadwal rutin memuat berita dan informasi dengan topik yang ringan dan up date di media sosial yang sering diakses oleh generasi milenial. Menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan media luar ruang (Videotron, dll) yang dimiliki untuk dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya.	Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Tokoh Masyarakat dan Panitia Lokal untuk menjadwalkan KIE selanjutnya mengingat masih banyak KIE yang belum terlaksana sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Melaksanakan kegiatan KIE dalam bentuk Cangkrukan dan AMKM, media sosial IG, FB dan Twitter, sms blast, Koran Kompas,dll	Melaksanakan kegiatan KIE dalam bentuk Cangkrukan dan AMKM, media sosial IG, FB dan Twitter, sms blast, Koran Kompas,dll
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target.	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target.	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Memuat berita dan informasi di media sosial IG, FB, Twitter; sms blast, sosialisasi keamanan pangan parcel dengan Cek KLIK. Melaksanakan kegiatan Cangkrukan dan AMKM.	Memuat berita dan informasi di media sosial IG, FB, Twitter; sms blast, sosialisasi keamanan pangan parcel dengan Cek KLIK. Melaksanakan kegiatan Cangkrukan dan AMKM.	Memuat berita dan informasi di media sosial IG, FB, Twitter; sms blast, sosialisasi keamanan pangan parcel dengan Cek KLIK. Melaksanakan kegiatan Cangkrukan dan AMKM.

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 30. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	92,61	-	-

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat

kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$Indeks\ Nasional = \sum (\sum(\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Dari link survei yang disampaikan kepada pelaku usaha, hingga triwulan II tahun 2022 diperoleh hasil sementara pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 92.61%

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tidak ada target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada triwulan I dan II tahun 2022 sehingga realisasi dan capaian belum dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI SEMENTARA TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,70	92,61	109,34	Baik

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2021 dapat ditarik secara mandiri oleh administrator Balai melalui link survei yang diberikan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, sehingga Balai dapat mengetahui realisasi sementara dengan hasil mencapai target dan mendapat kriteria baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya pada triwulan II meliputi Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan *Desk Consultation* Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dan Fasilitator dalam rangka Gempur Jatim, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap untuk UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra, Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan *Desk Consultation* Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) bersama Loka POM di Kabupaten Kediri, Desk Pra-Registrasi Pangan Olahan, *Desk consultation* IP CPPOB (Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk UMK pangan olahan dalam rangka Gempur Jatim di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pasuruan, Desk CAPA untuk Pemenuhan Persyaratan CPOTB Bertahap dan Pemenuhan Aspek CPKB. Seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan secara *hybrid* mengingat kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir dan kebutuhan pelaku usaha.

Kegiatan bimtek sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memahami proses bisnis di Badan POM terkait penerbitan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. Surat Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap / Surat Pemenuhan Aspek CPKB / Izin Penerapan CPPOB merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran produk di Badan POM. Setelah memperoleh bimtek, pelaku usaha dapat mempersiapkan persyaratan tersebut. Kemudian melalui *desk consultation*, pelaku usaha dapat langsung berkonsultasi dengan petugas terkait perbaikan yang harus dilakukan, baik yang melalui proses audit (untuk Sertifikasi CPOTB Bertahap dan SPA CPKB) maupun hanya evaluasi dokumen IP CPPOB. Kegiatan *desk consultation* merupakan upaya Balai Besar POM di Surabaya untuk semakin

meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan mempercepat proses perbaikan tersebut sehingga berdampak pada penerbitan sertifikat yang lebih cepat. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari inovasi pelayanan publik Sippotra, Jatim Glowing, dan Gempur Jatim untuk mendukung UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik.

Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 32. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	• Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	• Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM yang membutuhkan waktu lama
Rekomendasi Perbaikan	• Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan *desk consultation* • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap, serta melakukan *desk consultation*	• Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan *desk consultation* • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap, serta melakukan *desk consultation*	• Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan *desk consultation* • Melakukan layanan jemput bola ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan hulu perijinan bersama Dinas Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait

Keterangan	April	Mei	Juni
			persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap, serta melakukan *desk consultation*
Rencana Aksi	• Aktif di dalam grup *whatsapp* pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan *desk consultation* penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Melakukan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra di bulan April Melakukan pendampingan UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra dan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing	• Aktif di dalam grup *whatsapp* pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan *desk consultation* penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Melakukan layanan jemput bola ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan hulu perijinan bersama Dinas Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Melakukan pendampingan UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra dan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing	• Aktif di dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Melakukan pendampingan UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra dan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing • Mengadakan desk consultation untukpenyelesaian CAPA dalam rangka CPOTB Bertahap dan SPA CPKB
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Pemahaman pelaku UKOT dan UMOT tentang CPOTB Bertahap dan Persyaratan Izin Edar masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama	• Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Pemahaman pelaku UKOT dan UMOT tentang CPOTB Bertahap dan Persyaratan Izin Edar masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama	• Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei: • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat	Kondisi Juni: • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat	Kondisi Juli: -

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 33. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM

terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Hingga triwulan II tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Belum ada realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09	-	-	-

Belum ada realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat untuk Propinsi Jawa Timur 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 69,78 pada tahun 2019; 74,18 pada tahun 2020 dan 66,55 pada tahun 2021.

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung masih dilakukan secara terbatas selama awal tahun 2022 . Selama triwulan II tahun 2022 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.207 melalui berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio,

televisi, webinar (Cangkruan). Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder. Selama Triwulan II tahun 2022, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 31 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, Label Pangan, Bahan Tambahan Pangan, IP CPPOB, dll.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik terutama di masa pandemi covid 19 ini, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkru'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkru'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkru'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadop konsep Cangkru'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkru'an ini mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha. Selama Triwulan II tahun 2022, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 5 kali kegiatan Cangkru'an dengan jumlah total peserta 92 orang. Topik yang disampaikan pada kegiatan Cangkru'an antara lain adalah : Tata cara Registrasi Pangan Olahan versi Baru, Label pada Pangan Olahan, Notifikasi Kosmetika, IP CPPOB.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang

berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. *Agent of Change* BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Pada tahun 2022 ini telah diterbitkan beberapa peraturan baru terkait perizinan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dapat dimungkinkan menjadi penyebab menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikoordinasikan melalui system OSS membuat beberapa aplikasi milik BPOM yang selama ini telah berlangsung harus disesuaikan dan mengalami beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun petugas pelayanan publik BPOM terutama di UPT yang berhadapan langsung dengan masyarakat pelaku usaha. Sistem registrasi baru yang serba online dan tidak ada mekanisme offline mengakibatkan masyarakat pelaku usaha terutama UMKM yang pada umumnya mempunyai *literacy digital* yang rendah merasa kesulitan dan menganggap BPOM mempersulit proses perizinan. Terbatasnya layanan konsultasi secara langsung juga dapat dianggap menjadi penyebab menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM.

Berdasarkan hasil survey, aspek reliability yaitu kepuasan atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM merupakan aspek yang terendah, terutama pada katagori Obat Tradisional dan Kosmetik.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 35. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Penerapan perijinan terpadu melalui OSS sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja, PP 5 tahun 2021 dan PerBPOM 10 tahun 2021 masih menemui banyak permasalahan. Sistem yang masih belum established sementara harus segera diterapkan dengan sosialisasi yang masih minim dan kemampuan petugas yang belum setara mengakibatkan banyak terjadi permasalahan.	Masih banyak pelaku usaha/masyarakat yang menemui kendala dalam menggunakan Sistem Perizinan Terpadu yang terintegrasi dalam OSS.	Masyarakat mengeluhkan perubahan katagori pangan yang dulu boleh PIRT sekarang harus MD BPOM. Pelaku usaha juga menngeluhkan penggunaan teknologi informasi sementara sebagian besar UMKM masih kurang literasi digitalnya.

Keterangan	April	Mei	Juni
Rekomendasi/Perbaikan	Akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perijinan terpadu baik melalui media sosial maupun media lainnya. Akan dilakukan peningkatan kompetensi petugas pemberi layanan agar memiliki pemahaman yang sama tentang sistem perijinan terpadu.	Akan dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha yang masih menemui kendala dalam menggunakan sistem perizinan terpadu OSS	Akan dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM bahwa pengurusan izin edar di BPOM sekarang sudah jauh lebih sederhana. Selain itu juga diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi UMKM.
Rencana Aksi	Melakukan penyamaan persepsi petugas pemberi layanan melalui kegiatan morning breeze, diseminasi, dan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPOM maupun BKPM.	Dilakukan pendampingan sesuai permsalahan dan kendala serta tahapan pengurusan perizinan melalui layanan langsung, Cangkrukan AMKM, konsultasi melalui wa dan email.	Akan dilakukan sosialisasi pengurusan izin edar bagi UMKM melalui berbagai media baik media dan metode baik konsultasi langsung, media sosial, Cangkrukan, dll.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Perbedaan persepsi dalam memahami perizinan berusaha yang terintegrasi dalam OSS.	Banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem perizinan terpadu.	Banyak pelaku usaha UMKM yang mengeluhkan sistem perizinan yang sangat rumit dan menggunakan aplikasi sementara kemampuan UMKM menggunakan teknologi informasi sangat terbatas.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Masih terdapat perbedaan persepsi karena sistem yang terus berubah dan diperbaiki.	Keluhan masih ada namun sistem sudah lebih established sehingga mudah dipelajari dan diantisipasi.	Pelaku usaha UMKM menyadari bahwa mereka harus memenuhi aturan yang ditetapkan dan bersedia mempelajari dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 36. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	91,80	-	-

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai

kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP.

Hingga triwulan II tahun 2022, telah diperoleh hasil sementara indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dari aplikasi SAPA APIP sebesar 91,80.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Target indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik hanya ada di akhir tahun atau triwulan IV, sehingga tidak ada realisasi dan capaian yang bisa dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,50	91,80	101,44	Baik

Berdasarkan realisasi sementara yang tercantum pada aplikasi SAPA APIP, dapat diperkirakan bahwa Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 **berhasil mencapai target** dengan kriteria **baik**. Jika dibandingkan dengan dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 yaitu 91,72 maka terjadi sedikit peningkatan dibandingkan SKM triwulan II tahun 2022. Hal ini sebagai akibat telah dibukanya konsultasi dan layanan informasi tatap muka secara langsung di ruangan ULPK BBPOM Surabaya. Selain itu juga telah disediakan layanan konsultasi melalui nomor whatsapp khusus yang dapat diakses oleh para eksportir dan importir pengguna aplikasi e-bpom. Melalui nomor whatsapp ini para pelaku usaha dapat melakukan konsultasi denah secara langsung setelah mengajukan permohonan konsultasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 BBPOM di Surabaya akan dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb :

- Pengujian : 14 orang
- SKI/SKE : 89 orang
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 275 orang

Selama masa pandemi covid 19 layanan dialihkan hampir semuanya melalui media sosial dan tidak ada interaksi langsung (nir kontak) dengan konsumen. Dibutuhkan kompetensi khusus bagi pemberi layanan untuk memberikan layanan secara daring (online) sehingga semua informasi yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Belum lagi kemampuan konsumen yang berbeda beda dalam menggunakan peralatan/gadget komunikasi membuat mekanisme pemberian informasi tidak sepenuhnya dapat sampai kepada sebagian konsumen. Sebagian konsumen lebih memilih konsultasi tatap muka langsung, dimana mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas serta dapat melakukan klarifikasi langsung kepada pemberi layanan. Selain itu, para konsumen bahkan bisa minta didampingi mengisi aplikasi e sertifikasi, e registrasi, e bpom, e notifikasi atau Asrot jika menemui kesulitan saat mengisi di tempat kerja atau di rumah. Kehilangan hak istimewa dapat menyebabkan hasil survey Kepuasan Masyarakat menurun terutama di unsur kompetensi dan perilaku pelaksana layanan.

Demikian juga halnya dengan penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor BBPOM Surabaya karena pembatasan jumlah pengunjung ke BBPOM Surabaya.

Syukurlah pada triwulan II tahun 2022 layanan tatap muka mulai dilakukan secara penuh dan para pelaku usaha mulai memanfaatkan layanan ini dengan datang langsung ke kantor BBPOM Surabaya dan para petugas pemberi layanan publik dapat memberikan layanan secara paripurna. Selain itu juga telah disediakan nomor whatsapp khusus untuk konsultasu SKI/SKE dan konsultasi denah sarana produksi.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 38. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Pelayanan publik yang sebagian besar sudah menggunakan teknologi informasi dikeluhkan oleh sebagian besar pelaku usaha terutama UMKM karena pada umumnya pelaku usaha UMKM memiliki literasi digital yang belum memadai.	Masyarakat belum memahami standar pelayanan publik BBPOM Surabaya.	Padatnya kegiatan di BBPOM Surabaya dan terbatasnya jumlah SDM mengakibatkan pendampingan kepada pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara intens.
Rekomendasi/Perbaikan	Akan dilakukan pendampingan dan bimbingan teknik yang lebih intens kepada pelaku usaha UMKM.	Agar dilakukan sosialisasi dan forum konsultasi standar pelayanan publik.	Dapat memanfaatkan fasilitator (tenaga PKP dan DFI) yang telah dilatih oleh BBPOM Surabaya yang ada di masing masing Kabupaten/Kota.
Rencana Aksi	Pendampingan dan bimbingan teknis dilakukan melalui berbagai metode dan media antara lain media sosial, zoom meeting, konsultasi melalui wa dan email.	Dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BBPOM Surabaya untuk mendapatkan masukan dari seluruh kelompok masyarakat yang	BBPOM Surabaya telah memanfaatkan mahasiswa yang tergabung dalam program PAGC (Pangan Aman Goes to Campus) yang merupakan bagian dari Program MBKM

		hadir (akademisi, media, pelaku usaha, lintas sektor, dll).	(Merdeka Belajar Kampus Merdeka) sebagai fasilitator dan pendamping UMKM untuk memenuhi ketentuan peraturan.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Banyak pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi ketentuan karena tidak dapat menggunakan aplikasi dengan baik.	Standar Pelayanan Publik BBPOM Surabaya belum disosialisasikan.	Banyak pelaku usaha terutama UMKM yang tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Semakin banyak pelaku usaha yang dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan BPOM.	BBPOM Surabaya mendapatkan banyak masukan untuk perbaikan standar pelayanan publik yang telah disusun sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada resistensi dari masyarakat.	Semakin banyak pelaku usaha yang dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan BPOM.

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh 7 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan**

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 39. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	91	96,16	105,67	Baik
Mei	91	95,90	105,38	Baik
Juni	91	95,68	105,14	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \; x\; 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \; x\; 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \; x\; 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \; x\; 100\%$$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan II tahun 2022, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 401 keputusan/rekomendasi dari 422 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 105,14% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 40. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	98,44	108,18	Baik
Triwulan II	95,68	105,14	Baik

Realisasi dan capaian keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di triwulan II turun dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan dampak dari pandemi, dimana bulan mei dan juni digunakan untuk mengejar target pemeriksaan sarana yang masih tertinggal jauh, sehingga petugas belum sepenuhnya selesai membuat surat tindak lanjut, selain itu juga karena kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 41. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	95,68	105,14	Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga triwulan II tahun 2022 **telah mencapai** target akhir tahun 2022, dengan capaian kategori baik. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga triwulan IV tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan II, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 94,75% , karena sampai jatuh tempo timeline masih ada surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas belum ditindaklanjuti, setiap hari petugas melaksanakan pemeriksaan sarana sehingga tidak ada/ kurang waktu untuk menyelesaikan surat tindak lanjut. Dan oleh karena itu tetap secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tersebut. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 96,30% dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 91,67% karena surat dating di

akhir Juni sehingga belum ditindaklanjuti. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100 % karena surat rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang perlu tindak lanjut pusat sudah ditindaklanjuti.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 42. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Kurangnya waktu petugas untuk membuat surat tindak lanjut karena setiap hari melaksanakan pemeriksaan sarana • Penambahan personil baru yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan	• Kurangnya waktu petugas untuk membuat surat tindak lanjut karena setiap hari melaksanakan pemeriksaan sarana • Surat dari Pusat masuk di akhir Mei sehingga di bulan Mei belum ditindaklanjuti • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan	• Kurangnya waktu petugas untuk membuat surat tindak lanjut karena setiap hari melaksanakan pemeriksaan sarana • Surat dari Pusat menunggu hasil uji dari laboratorium • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan
Rekomendasi Perbaikan	• Diberikan waktu untuk menyelesaikan surat tindak lanjut • Diberikan pembekalan dan penambahan kompetensi secara internal bagi personil baru • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	• Diberikan waktu untuk menyelesaikan surat tindak lanjut • Mempercepat surat pusat untuk segera ditindaklanjuti • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	• Diberikan waktu untuk menyelesaikan surat tindak lanjut • Mempercepat uji laboratorium • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Rencana Aksi	• Personil baru diberikan pembekalan dan penambahan kompetensi oleh inspektur senior • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	• Percepatan menindaklanjuti surat pusat • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	• Percepatan uji laboratorium • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Personil baru belum mengetahui cara membuat surat tindak lanjut • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan	• Surat pusat belum ditindaklanjuti • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan	• Uji laboratorium belum dilakukan • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Personil baru masih dalam proses pembelajaran untuk membuat surat tindak lanjut dengan inspektur senior • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	• Surat pusat sudah ditindaklanjuti • Meningkatkan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	• Uji laboratorium dalam proses dilakukan • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan • Progress Juni : Capaian sudah mendapatkan kriteria Baik tetapi terjadi penurunan % capaian dari 105,38% menjadi 105,14%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan pada TW III 2022

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 43. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	69	67,37	97,64	baik
Mei	69	68,92	99,88	baik
Juni	69	69,28	100,40	baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

$$A = \frac{\textbf{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\textbf{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \; x \; 100\%$$

$$B = \frac{\textbf{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\textbf{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \; x \; 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil

pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Pada triwulan II tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 351 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 167 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 100,40 % dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 44. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	61,90	89,72	Cukup
Triwulan II	69,28	100,40	Baik

Realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan di triwulan II naik dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan sosialisasi yang terus menerus dilakukan, monitoring dan evaluasi terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector yang rutin.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69,28	100,40	Baik

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan II tahun 2021 **sudah mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria **baik**. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan II tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 45,70 %, sedangkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 92,86 %.

Dari hasil tersebut, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sector sudah memenuhi dari target yang ditetapkan.

Persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah memenuhi dari target yang ditetapkan, disebabkan sosialisasi yang terus menerus dilakukan, sering menanyakan feedback dari surat tindak lanjut yang dikirimkan melalui whatsApp dan berkirim surat kembali bila belum mengirimkan feedback dari surat tindak lanjut yang dikirimkan.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 46. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback • Kurangnya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector	• Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback • Kurangnya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector	• Tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback
Rekomendasi Perbaikan	• Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback • Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector • Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback	• Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback • Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector • Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback	• Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback • Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector • Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback
Rencana Aksi	• Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback • Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector	• Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback • Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector	• Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback • Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector • Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Pelaku Usaha dan/ Lintas sector tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya • Kurangnya monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector	• Pelaku usaha dan/Lintas sector sedikit perlahan mulai memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya	• Pelaku usaha dan/Lintas sector mulai memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Pelaku usaha dan/Lintas sector sedikit perlahan mulai	• Pelaku usaha dan/Lintas sector mulai memberikan	Progress Juni: Terdapat kenaikan % capaian dari

Keterangan	April	Mei	Juni
	memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 67,37 %	respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya • Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 68,92 %	89,71% menjadi 100,40%. Kenaikan % capaian akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada Triwulan III tahun 2022

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 47. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	98,5	93,88	95,31	baik
Mei	98,5	94,86	96,30	baik
Juni	98,5	93,55	94,98	baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{\textbf{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textbf{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \; x\ 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO

di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II tahun 2022 diperoleh dari **8.486** sertifikat yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan **9.071** sertifikat yang diterbitkan sehingga memperoleh hasil 93,55%. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 94,98% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 48. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	96,09	97,55	Baik
Triwulan II	93,55	94,98	baik

Realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II turun dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan adanya gangguan dari sistem aplikasi serta kekurangan SDM karena pensiun di triwulan II.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	93,55	94,98	Baik

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **baik**, dengan demikian perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kondisi pandemi yang masih terjadi pada triwulan II tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara *on site* menjadi berkurang. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara *on site* dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat mengamati secara keseluruhan. Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik pada triwulan II diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi usaha menengah besar dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan saat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit.

Sertifikasi CDOB pada triwulan II belum dapat dihitung dikarenakan proses CAPA yang masih terus berjalan hingga 1 tahun pelaksanaan anggaran. Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan dimungkinkan karena adanya kondisi pandemi.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan *timeline* SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Namun perhitungan *timeline* SKI tetap sesuai peraturan yaitu 6 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan timeline tersebut, antara lain:

- Terdapat gangguan sistem e-bpom pada jam kerja sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan waktu penerbitan (*timeline*) SKI / SKE, dikarenakan proses migrasi data ke Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga SKI/SKE tidak dapat dievaluasi meskipun data sudah mengalir di sistem e-bpom ke akun evaluator balai. Kendala ini terjadi pada periodei tanggal 23 Mei hingga 18 Juni 2022. Setelah tanggal 18 Juni 2022 masih terdapat kendala status pembayaran oleh pemohon sehingga terdapat beberapa

permohonan yang telah dilakukan pembayaran belum mengalir ke akun evaluator balai/ status pengajuan PAID, namun belum SENT sehingga terdapat penundaan aliran pengajuan layanan ke akun balai.

- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Sistem e-bpom belum dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan.
- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat petugas sertifikasi yang mutasi ke unit lain dan petugas yang memasuki purna tugas, dan terdapat petugas baru yang menggantikan namun belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE. Hal ini menyebabkan penerbitan rekomendasi SKI/SKE membutuhkan waktu yang lama.
- Terkait *timeline* yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara mengerjakan SKI penolakan, SKI komoditi pangan dan obat lebih dulu.
- Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan *timeline* 1 hari sesuai dengan inovasi SKETSA.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 50. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Terdapat petugas sertifikasi yang mutasi ke unit lain dan terdapat petugas baru	• Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Terdapat petugas yang memasuki purna tugas, dan terdapat petugas baru	• Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Terdapat migrasi data e-bpom ke Pusat Data Nasional Kementerian

Keterangan	April	Mei	Juni
	yang menggantikan namun belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE. Hal ini menyebabkan penerbitan rekomendasi SKI/SKE membutuhkan waktu yang lama. ● Terdapat pengajuan SKE / SKI yang perlu dikonsultasikan ke BPOM dalam pengambilan keputusannya ● Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	yang menggantikan namun belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE. Hal ini menyebabkan penerbitan rekomendasi SKI/SKE membutuhkan waktu yang lama. ● Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama ● Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama	Komunikasi dan Informasi sehingga e-bpom yang sudah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi ● terdapat petugas baru yang menggantikan namun belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE. Hal ini menyebabkan penerbitan rekomendasi SKI/SKE membutuhkan waktu yang lama. ● Terdapat pengajuan SKE / SKI yang perlu dikonsultasikan ke BPOM dalam pengambilan keputusannya ● Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama ● Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama
Rekomendasi Perbaikan	● Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir ● Petugas lama melakukan *coaching* kepada petugas baru ● Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat ● Terus menindaklanjuti respon dari petugas BPOM dan segera menginformasikannya kepada eksportir / importir ● Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap	● Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir ● Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat ● Petugas lama melakukan coaching kepada petugas baru ● Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap	● Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir ● Menyampaikan kepada Pusdatin BPOM terkait kendala migrasi dan menyampaikan ke pelaku usaha terkait migrasi tersebut dan pengaruhnya terhadap proses submit dan evaluasi ebpom ● Petugas lama melakukan coaching kepada petugas baru ● Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap
Rencana Aksi	● Berperan aktif dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI ● Petugas lama aktif memberikan *coaching*	● Berperan aktif dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI ● Petugas lama aktif memberikan coaching	● Berperan aktif dalam grup whatsapp pengguna layanan SKE / SKI ● Aktif menindaklanjuti proses migrasi data ke

Keterangan	April	Mei	Juni
	kepada petugas baru • Aktif menindaklanjuti respon dari petugas BPOM dan segera menginformasikannya kepada eksportir / importir • Mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Mengadakan Bimtek CPPOB untuk pelaku usaha dan fasilitator eksternal • Mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra pada bulan April • Melakukan pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing	kepada petugas baru • Aktif menindaklanjuti respon dari petugas BPOM dan segera menginformasikannya kepada eksportir / importir • Mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Melakukan layanan jemput bola ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan hulu perijinan bersama Dinas Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Melakukan pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing • Melakukan pendampingan UKOT dan UMOT dalam rangka Sippotra	Pusdatin BPOM • Petugas lama aktif memberikan coaching kepada petugas baru • Aktif menindaklanjuti respon dari petugas BPOM dan segera menginformasikannya kepada eksportir / importir • Mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Melakukan layanan jemput bola ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan hulu perijinan bersama Dinas Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Mengadakan desk consultation CAPA SPA CPKB dalam rangka Jatim Glowing dan CPOTB Bertahap dalam rangka Sippotra
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Capaian target SLA menurun • Respon petugas BPOM terkait SKE / SKI cukup lama • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Pelaku UKOT dan UMOT tidak memahami tahapan dan persyaratan CPOTB Bertahap • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama, terdapat pelaku UMKM Kosmetik tidak memahami langkah dan persyaratan pemenuhan SPA CPKB	• Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Capaian target SLA menurun • Respon petugas BPOM terkait SKE / SKI cukup lama • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama, terdapat pelaku UMKM Kosmetik tidak memahami langkah dan persyaratan pemenuhan SPA CPKB • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama	• Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Capaian target SLA menurun • Respon petugas BPOM terkait SKE / SKI cukup lama • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama, terdapat pelaku UMKM Kosmetik tidak memahami langkah dan persyaratan pemenuhan SPA CPKB • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPOTB Bertahap oleh UKOT dan UMOT membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei: • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Respon petugas BPOM tidak selalu cepat • Terdapat peningkatan persentase capaian terhadap target • Terdapat penambahan	Kondisi Juni: • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Respon petugas BPOM tidak selalu cepat • Terdapat penurunan persentase capaian terhadap target • Terdapat penambahan	Kondisi Juli: -

Keterangan	April	Mei	Juni
	jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan ● CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat	jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan ● CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat	

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 51. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	60	55,32	92,20	Baik
Mei	60	51,98	86,63	Cukup
Juni	60	57,20	95,33	Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \; x\; 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Pada triwulan 1I tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 155 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 95 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 60 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan II adalah sebesar 57,20%. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan II adalah 95,33% **belum mencapai target** yang ditetapkan meskipun dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 52. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	50,98	84,97	Cukup
Triwulan II	57,20	95,33	Baik

Realisasi dan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan II naik dibandingkan dengan triwulan I.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	57,20	95,33	Baik

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **baik**. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan 1I dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri farmasi) sebanyak 6 sarana, dengan hasil 4 memenuhi ketentuan dan 2 tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 14 sarana, dengan hasil 10 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi obat tradisiona, IOT/IEBA sebanyak 1 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan, sarana produksi

suplemen Kesehatan sebanyak 2 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; sarana produksi UKOT sebanyak 9 sarana dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 3 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 113 sarana dengan hasil 71 sarana memenuhi ketentuan dan 42 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 7 saranan dengan hasil tidak memenuhi ketentuan.

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022 adalah 57,20% **belum mencapai target** yang ditetapkan meskipun dengan kriteria **"BAIK"**. Hal ini dikarenakan pada triwulan II tahun 2022; pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; adanya pemeriksaan sarana sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat, sehingga profil hasil pemeriksaan yang didapat adalah banyak sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan. Meskipun demikian, terjadi peningkatan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan II jika dibandingkan dengan triwulan I, yaitu dari 50,98 % menjadi 57,20 %. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan pemahaman inspektur terkait penggunaan form pemeriksaan produksi pangan (form 68).

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 54. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Terdapat permintaan pendampingan pemeriksaan dari pusat dan penelusuran kasus • Terdapat penambahan personil baru dengan kompetensi yang belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan • Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; • Adanya pemeriksaan sarana sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat • Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; • Adanya pemeriksaan sarana sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat • Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Rekomendasi Perbaikan	• Induction period untuk personil baru, dimana pada masa induksi tersebut dilakukan pembekalan dan penambahan kompetensi secara internal oleh	• Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari	• Pengefektifan jadwal pemeriksaan terkait penelusuran kasus dan pendampingan pemeriksaan • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana

Keterangan	April	Mei	Juni
	inspektur senior/inspektur kepala/ketua tim • Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Rencana Aksi	• Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru • Dilakukan In house Training sertifikasi CDOB dengan narasumber pusar pada tanggal 12 April 2022 • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Memprioritaskan target pemeriksaan rutin • Target sarana pemeriksaan disusun oleh masing – masing kedeputian • Meningkatkan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan • Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang • Pada bulan Juli 2022 dijadwalkan secara rutin setiap minggu untuk dilakukan sosialisasi/ learning session/ Inhouse training untuk memperkecil GAP kompetensi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Personil baru belum dapat melakukan pemeriksaan • Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko • Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Beberapa penelusuran kasus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin • Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan • Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Personil baru mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior • Progress Mei: Terdapat penurunan % capaian dari 92,20% menjadi 86,63%. Diharapkan % capaian dapat tercapai pada Juni 2022	Progress Juni: Terdapat kenaikan % capaian dari 86,63% menjadi 95,33%. Kenaikan % capaian tersebut belum optimal. Diharapkan % capaian dapat tercapai pada Triwulan III tahun 2022

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 55. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	62	60,09	96,92	Baik
Mei	62	62,65	101,05	Baik
Juni	62	65,00	104,84	Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \; x\ 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Pada triwulan 1I tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 346 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 235 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 111 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk sampai dengan triwulan II adalah sebesar 65,00%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan II **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,84 % dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 56. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	57,46	92,68	Baik
Triwulan II	65,00	104,84	Baik

Realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan II naik dibandingkan dengan triwulan I seiring dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	65,00	104,84	Baik

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan II tahun 2022 **telah mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria Baik. Capaian ini perlu dipertahanakan agar tetap mencapai target mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan II dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat sebanyak 148 sarana dengan hasil 96 sarana memenuhi ketentuan dan 52 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat tersebut terdiri atas pemeriksaan pada GFK sebanyak 12 sarana dengan hasil 11 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan pada sarana PBF sebanyak 33 saranan dengan hasil 21 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana apotek sebanyak 19 sarana dengan hasil 10 sarana memenuhi ketentuan dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana klinik sebanyak 28 sarana dengan hasil 15 sarana memenuhi ketentuan dan 13 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana

puskesmas sebanyak 22 sarana dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana toko obat sebanyak 10 sarana dengan hasil 6 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Selain tersebut diatas, pada triwulan 1I tahun 2022 juga dilakukan pemeriksaan distribusi obat tradisional, distribusi suplemen Kesehatan, distribusi kosmetika dan distribusi pangan sebanyak 198 sarana dengan hasil 139 sarana memenuhi ketentuan dan 59 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional meliputi pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional tk kesulitan 1 sebanyak 69 sarana dengan hasil 40 sarana memenuhi ketentuan dan 29 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan terhadap 1 importir obat tradisional dengan hasil memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan sebanyak 42 sarana dengan hasil 41 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 69 sarana yang terdiri dari pemeriksaan toko kosmetika sebanyak 56 sarana dengan hasil 43 memenuhi ketentuan dan 13 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan pada penotifikasi kosmetika sebanyak 11 sarana dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 17 sarana yang terdiri dari pemeriksaan sarana distribusi pangan tk kesulitan 1 sebanyak 13 sarana dengan hasil 6 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana distribusi pangan tk kesulitan 2 sebanyak 4 sarana dengan hasil 3 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan pemeriksaan sarana distribusi, diantaranya adalah pemeriksaan rutin pada sarana penotifikasi kosmetika, dan sarana distribusi suplemen Kesehatan. Tahun 2021, pemeriksaan suplemen makanan di sarana distribusi dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, sedangkan pada tahun 2022, pemeriksaan sarana distribusi dilakukan baik pada sarana distribusi obat tradisional dan sarana distribusi suplemen Kesehatan.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 58. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Terdapat permintaan pendampingan pemeriksaan dari pusat dan penelusuran kasus	• Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi	• pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking

Keterangan	April	Mei	Juni
	• Terdapat pemeriksaan terkait produk coklat kinderjoy • Terdapat penambahan personil baru dengan kompetensi yang belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan • Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Beberapa data sarana penotikasi kosmetika tidak update, alamat yang tercantum pada data based tidak lengkap, hanya berupa nama jalan / nama desa dan RT RW saja, kontak person yang ada pada data based tidak dapat dihubungi sehingga memperlama waktu pencarian lokasi sarana	prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; • Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi
Rekomendasi Perbaikan	• Induction period untuk personil baru, dimana pada masa induksi tersebut dilakukan pembekalan dan penambahan kompetensi secara internal oleh inspektur senior/inspektur kepala/ketua tim • Dilakukan Sosialisasi/ Learning session/ In house training secara berkala untuk menyamakan persepsi dan memperkecil GAP Kompetensi • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya • Menyampaikan keluhan terkait ketidaklengkapan alamat sarana penotifikasi kosmetika kepada kedeputian 2	• Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya
Rencana Aksi	• Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru • Dilakukan In house Training sertifikasi CDOB dengan narasumber pusar pada tanggal 12 April 2022 • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang • Diperoleh Informasi pada tanggal 25 Mei 2022 bahwa Sarana penotif yang pindah alamat/ tidak ditemukan alamat penotif sesuai dengan di web reg bisa dimasukkan capaian dengan hasil TMK	• Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang • Pada bulan Juli 2022 dijadwalkan secara rutin setiap minggu untuk dilakukan sosialisasi/ learning session/ Inhouse training untuk memperkecil GAP kompetensi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Personil baru belum dapat melakukan pemeriksaan • Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko • Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai	• Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Personil baru mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior • Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	• Beberapa Personil dengan GAP kompetensi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior	Progress Juni: Terdapat kenaikan % capaian dari 92,68% menjadi 104,84%. Kenaikan % capaian akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada Triwulan III tahun 2022

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 59. Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hingga triwulan II tahun 2022 belum diperoleh Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Tim Penilai UPP pusat secara resmi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 belum didapatkan indeks Pelayanan Publik tahun 2022 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4,45	-	-	-

Realisasi indeks pelayanan publik hingga triwulan II tahun 2022 belum diperoleh secara resmi dari Tim Penilai UPP pusat.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2021 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,52 bagi BBPOM di Surabaya menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sebesar 4,11. Belajar dari rendahnya nilai IPP tahun 2020 bahkan turun dari nilai IPP tahun 2019, BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb :

- Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, Perkosmi, GAPMMI, akademisi diwakili oleh Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya, YLKI sebagai perwakilan suara konsumen, komunitas masyarakat diwakili antara lain oleh Pramuka, Muslimat, Fatayat, dll, lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta media. Pada tanggal 31 Mei 2022 telah dilakukan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan semua komponen masyarakat tersebut untuk mendapatkan masukan terhadap draft Standar Pelayanan Publik (SPP) yang sedang disusun dan merupakan penyempurnaan dari SPP sebelumnya.
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik.

- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah *no one left behind,* semua harus mendapat layanan yang sama.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan *tracking system* untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : **Laskar**

(Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), AMKM Anda Menanyakan Kami Menjawab, **Pinarak Rek, Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawaal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional)**, Jatim Glowing** (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja)

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 61. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Penerapan perijinan terpadu melalui OSS sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja, PP 5 tahun 2021 dan PerBPOM 10 tahun 2021 masih menemui banyak permasalahan. Sistem yang masih belum established sementara harus segera diterapkan dengan sosialisasi yang masih minim dan kemampuan petugas yang belum setara mengakibatkan banyak terjadi permasalahan.	Masyarakat belum memahami standar pelayanan publik BBPOM Surabaya.	Beberapa persyaratan pelanggan belum dapat dipenuhi karena keterbatasan lokasi kantor, SDM dan anggaran.
Rekomendasi/Perbaikan	Akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perijinan terpadu baik melalui media sosial maupun media lainnya. Akan dilakukan peningkatan kompetensi petugas pemberi layanan agar memiliki pemahaman yang sama tentang sistem perijinan terpadu.	Agar dilakukan sosialisasi dan forum konsultasi standar pelayanan publik.	Akan diusulkan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga dapat terpenuhi semua persyaratan pelanggan.
Rencana Aksi	Melakukan penyamaan persepsi petugas pemberi layanan melalui kegiatan morning breeze, diseminasi, dan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPOM maupun BKPM.	Dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BBPOM Surabaya untuk mendapatkan masukan dari seluruh kelompok masyarakat yang hadir (akademisi, media, pelaku usaha, lintas sektor, dll).	Kebutuhan persyaratan pelanggan telah diusulkan dalam dokumen DIPA, namun demikian terkendala dengan pemotongan/refocusing anggaran.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Perbedaan persepsi dalam memahami perizinan berusaha yang terintegrasi dalam OSS.	Standar Pelayanan Publik BBPOM Surabaya belum disosialisasikan.	Kebutuhan pesyaratan pelanggan belum semua terpenuhi.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Telah terbentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik.	Melaksanakan sharing session setiap hari Rabu (morning breeze) membahas isu isu terkini dan sharing knowledge.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 62. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisioanl dan kosmetik yang baik hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	33	54,75	165,91	Tidak dapat disimpulkan
Mei	41	60,56	147,71	Tidak dapat disimpulkan
Juni	50	69,86	139,72	Tidak dapat disimpulkan

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \; x\; 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \; x\; 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \; x\; 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2)

Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2022. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2022.

Pada triwulan II terdapat pendampingan terhadap 204 sarana UMK pangan olahan, 27 sarana UMKM Obat Tradisional dan 23 sarana UMKM Kosmetik. Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan II sebesar 69,86% sehingga didapatkan capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik sebesar 139,72% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 63. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	37,45	113,49	Sangat Baik
Triwulan II	69,86	139,72	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan II naik dibandingkan dengan triwulan I dengan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan yang disebabkan karena target bulan Juni yang terlalu rendah. Pada triwulan II telah diusulkan perubahan target triwulan III dan IV.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	100	69,86	69,86	Kurang

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022. Target tahun 2022 adalah 60% UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM, bukan UMKM yang memenuhi standar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan II, diperoleh capaian lebih dari 100%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik terus dilakukan dengan untuk peningkatan pemahanan pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsul denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot dan notifkosd.

Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh.

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat sarana usaha mikro kecil yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan di hulu perijinan sebelum melakukan pengurusan ijin edar Badan POM dan beberapa permasalahan internal / kendala ekonomi pada pelaku usaha.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 65. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	- Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah - Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah - Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah	- Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah - Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah - Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah	- Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah - Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah - Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah
Rekomendasi Perbaikan	- Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif - Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif - Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif	- Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif - Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif - Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif	- Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif - Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif - Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif
Rencana Aksi	- Melakukan pendampingan, mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB di bulan April - Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional dan mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Tradisional pada bulan April - Melakukan pendampingan UMKM kosmetik	- Melakukan pendampingan, mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB di bulan April - Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional dan mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Tradisional pada bulan April - Melakukan pendampingan UMKM kosmetik	- Melakukan pendampingan, mengadakan desk consultation penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB di bulan April - Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional dan mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Tradisional pada bulan April - Melakukan pendampingan UMKM kosmetik -Melakukan desk CAPA CPOTB & CPKB
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama - Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama - Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama	- Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama - Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama - Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama	- Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama - Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama - Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Setelah Rencana Aksi	● Kondisi Mei - Diterbitkan beberapa IP CPPOB UMK Pangan - Terdapat UMKM Obat tradisional memperoleh rekomendasi SKPA CPOTB Bertahap - Terdapat UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi SPA CPKB	● Kondisi Juni - Diterbitkan beberapa IP CPPOB UMK Pangan - Terdapat UMKM Obat tradisional memperoleh rekomendasi SKPA CPOTB Bertahap - Terdapat UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi SPA CPKB	Kondisi Jul -i

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 66. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	92,92	98,07	105,54	Baik
Mei	92,92	98,07	105,54	Baik
Juni	92,92	91,77	98,76	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Surabaya memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BBPOM di Surabaya melaksanakan Survei Efektifitas KIE hingga triwulan II tahun 2022 dengan jumlah responden mencapai 223 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan). Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkru'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya pada triwulan II tahun 2022 adalah 91,77 dari target 92,92 atau dengan capaian 98,76% yang artinya **belum mencapai target** dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 67. Perbandingan realisasi dan capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	98,07	105,54	Baik
Triwulan II	91,77	98,76	Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 adalah 91,77 menurun jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2022 sebesar 98,07. Hal ini diakibatkan karena pada triwulan II terjadi penurunan jumlah pelaksanaan KIE Bersama Tokoh masyarakat anggota Komisi IX DPR RI yaitu hanya 9 kali karena adanya libur lebaran dan pelaksanaan kegiatan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92	91,77	98,76	Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target akhir tahun 2022 dengan kriteria **baik**. Hal ini perlu dipertahankan hingga triwulan IV.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah melaksanakan sebanyak 9 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Surabaya dan Sidoarjo dengan peserta kurang lebih sebanyak 250 orang di tiap titik lokasi. Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkru'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali masing masing diikuti oleh 25 sampai 40 peserta. Kegiatan Cangkru'an ini dilaksanakan berdasarkan jadwal rutin yang telah ditetapkan maupun dalam rangka memenuhi permintaan komunitas tertentu misalnya komunitas UMKM atau lintas sektor tertentu. BBPOM Surabaya juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di kabupaten/kota se Jawa Timur. Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi BBPOM Surabaya untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BBPOM Surabaya harus peka akan kebutuhan informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat. Salah satu contoh pelaksanaan KIE dengan mempertimbangkan target audien dan media adalah kampanye produk kosmetik. Pada triwulan II tahun 2022, BBPOM di Surabaya menyelenggarakan pemilihan Duta Kosmetik Aman yang ternyata sangat menarik bagi kalangan generasi milenial tidak hanya perempuan tetapi juga laki laki. Kegiatan dilaksanakan pada 20 dan 21 Juni 2022 dan menghasilkan 3 peserta terbaik yang akan terpilih ke tingkat Nasional sebagai Duta Kosmetik Aman mewakili Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya 3 duta akan melaksanakan kegiatan Advance Training Duta (13-14 Juli 2022) yang diselenggarakan Direktorat PMPU OT SK KOS.

Bergerak dari hasil survey pada triwulan II tahun 2022 ini, yang menurun jika dibandingkan dengan hasil survey triwulan I tahun 2022, harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan

dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 yang belum mencapai target yang ditetapkan, BBPOM Surabaya harus bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih friendly dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan Pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 69. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Pelaksanaan KIE terkonsentrasi di wilayah wilayah sesuai dengan daerah pemilihan tokoh masyarakat anggota DPR RI, belum merata ke seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya.	Pelaksanaan KIE terkendala libur lebaran.	Bulan Juni pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu (Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan PJAS Aman). Terbatasnya jumlah SDM di Infokom. Pada saat pelaksanaan KIE hampir semua SDM bertugas di kegiatan KIE, padahal layanan ULPK tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh kosong.
Rekomendasi/Perbaikan	Agar memanfaatkan Media Sosial yang dimiliki BBPOM Surabaya dan instansi lain untuk menyebarluaskan informasi tentang Obat dan Makanan.	Akan melaksanakan KIE melalui media dan metode yang lain misalnya media sosial, zoom meeting, melibatkan komunitas komunitas masyarakat, dll.	Akan melaksanakan KIE melalui media dan metode yang lain misalnya media sosial, zoom meeting, melibatkan komunitas komunitas masyarakat, dll. Melibatkan/meminta bantuan SDM dari Bagian/Kelompok substansi lain sehingga semua kegaitan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan.
Rencana Aksi	Membuat jadwal rutin memuat berita dan informasi dengan topik yang ringan dan up date di media sosial yang sering diakses oleh generasi milenial. Menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan media luar ruang (Videotron, dll) yang dimiliki untuk dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya.	Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Tokoh Masyarakat dan Panitia Lokal untuk menjadwalkan KIE selanjutnya mengingat masih banyak KIE yang belum terlaksana sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Melaksanakan kegiatan KIE dalam bentuk Cangkrukan dan AMKM, media sosial IG, FB dan Twitter, sms blast, Koran Kompas,dll	Melaksanakan kegiatan KIE dalam bentuk Cangkrukan dan AMKM, media sosial IG, FB dan Twitter, sms blast, Koran Kompas,dll

Keterangan	April	Mei	Juni
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat dan tingkat efektifitas KIE belum mencapai target.	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat dan tingkat efektifitas KIE belum mencapai target.	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat dan tingkat efektifitas KIE belum mencapai target.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Memuat berita dan informasi di media sosial IG, FB, Twitter; sms blast, sosialisasi keamanan pangan parcel dengan Cek KLIK. Melaksanakan kegiatan Cangkrukan dan AMKM.	Memuat berita dan informasi di media sosial IG, FB, Twitter; sms blast, sosialisasi keamanan pangan parcel dengan Cek KLIK. Melaksanakan kegiatan Cangkrukan dan AMKM.	Memuat berita dan informasi di media sosial IG, FB, Twitter; sms blast, sosialisasi keamanan pangan parcel dengan Cek KLIK. Melaksanakan kegiatan Cangkrukan dan AMKM.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 70. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	20	20	100	Baik
Mei	25	23,41	93,64	Baik
Juni	40	40,01	100,03	Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Ponorogo. Target tahun 2022 adalah 34 sekolah baru dan 42 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2021.

Hingga akhir triwulan II tahun 2022, progres program PJAS yang telah dilaksanakan adalah audiensi dan advokasi ke 6 Kabupaten/Kota yang menjadi target intervensi. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader PJAS. Sampai akhir triwulan II tahun 2022 telah dilakukan bimbingan teknis kader PJAS ke 29 sekolah dari target 34 sekolah. Selain itu juga telah dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada 60 Sekolah dari target 176 sekolah. Progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **telah tercapai** yaitu 100,02% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 71. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	10,00	66,67	Kurang
Triwulan II	40,01	100,03	Baik

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang hanya 10% maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian triwulan I sangat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu para Kepala Daerah menerima Tim Audiensi BBPOM Surabaya. Beberapa Kepala Daerah mempunyai agenda yang sangat padat sehingga BBPOM Surabaya menemui kesulitan mendapatkan alokasi waktu untuk melakukan audiensi.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100%	40,01%	40,01	Sangat Kurang

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan II tahun 2022 telah tercapai target tahun 2022 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajajan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 34 sekolah target intervensi tahun 2022. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan Rapid Test Kit Bahan Berbahaya.

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah karena kegiatan pembelajaran terpaksa dialihkan secara daring sehingga seluruh kantin sekolah tidak beroperasi bahkan pada saat pembelajaran telah dilakukan secara tatap muka sebagian besar kantin sekolah juga tetap tutup. Diharapkan pada tahun 2022 ini kondisi pandemi semakin melandai dan berubah menjadi endemi sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan secara luring/tatap muka langsung. Pada triwulan II tahun 2022 sebagian besar sekolah telah melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung sehingga diharapkan program PJAS dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 73. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Tidak ada kendala, advokasi dapat selesai dilaksanakan hingga bulan April 2022	Kegiatan BImtek kader sekolah belum dapat dilaksanakan di bulan Mei karena menyesuaikan agenda sekolah akhir tahun pelajaran	Pengadaan paket edukasi yang belum realisasi, salah satunya karena kendala materi
Rekomendasi/Perbaikan	Memastikan semua tahapan program PJAS dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk penjadwalan ulang Bimtek Kader Sekolah.	Melakukan pendataan materi yang akan dibuat

Keterangan	April	Mei	Juni
Rencana Aksi	Membuat perencanaan mingguan untuk memastikan kegiatan dapat dilakukan sesuai jadwal dan melakukan sinkronisasi dengan kegiatan lain.	Pelaksanaan Bimtek Kader sekolah pada bulan Juni.	Menyusun tim pembuatan materi, percepatan pengadaan paket edukasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kegiatan telah terjadwal (bulanan)	Kegiatan Bimtek Kader Sekolah tertunda dan belum ada kepastian.	Tim mengerjakan pekerjaan prioritas lain
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Jadwal mingguan pelaksanaan kegiatan.	Kegiatan Bimtek Kader Sekolah terjadwal sesuai koordinasi dengan masing masing sekolah.	Paket edukasi menjadi prioritas untuk segera diselesaikan dengan timeline yang pendek

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 74. Jumlah desa pangan aman hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	20	25	125	Tidak dapat disimpulkan
Mei	25	28,33	113,32	Sangat Baik
Juni	35	41,67	119,06	Sangat Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Hingga akhir triwulan II tahun 2022, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah audiensi dan advokasi ke 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota

Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ponorogo. Setelah penentuan lokus dalam advokasi, tahapan selanjutnya adalah Bimtek Kader Desa. Sampai akhir triwulan II tahun 2022 telah dilakukan bimtek kader ke 7 desa dari 9 desa yang menjadi target intervensi. Capaian tahapan jumlah desa pangan aman **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 119,6 % dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 75. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah desa pangan aman triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	10	66,67	Kurang
Triwulan II	41,67	119,06	Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang hanya 10% maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian triwulan II sangat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu para Kepala Daerah menerima Tim Audiensi BBPOM Surabaya. Beberapa Kepala Daerah mempunyai agenda yang sangat padat sehingga BBPOM Surabaya menemui kesulitan mendapatkan alokasi waktu untuk melakukan audiensi.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan II Tahun 2022 dengan Target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	100%	41,67	41,67	Sangat kurang

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang

sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhtes kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Berkaca dari pelaksanaan program yang sama pada tahun 2021, kegiatan bimbingan teknis kepada kader kurang efektif jika dilaksanakan secara daring. Hal ini nampak pada tahapan tahapan berikutnya, kader nampak bingung dan tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Syukurlah keadaan membaik sehingga bimbingan teknis kader desa dapat dilaksanakan secara luring atau tatap muka secara langsung sehingga para kader dapat memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 77. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Jumlah Desa Pangan Aman

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Tidak ada kendala, selanjutnya tetap melakukan koordinasi dan komunikasi untuk tahapan selanjutnya	Salah satu lokus Kelurahan di Batu yang ingin mundur karena padatnya kegiatan di tahun 2022	Adanya perpindahan lokus 1 desa, sebelumnya di Kota Batu, dialihkan ke Kab. Tuban
Rekomendasi/ Perbaikan	Memastikan semua tahapan program Desa Pangan Aman dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan	Melakukan komunikasi dengan Pemkot dan Kelurahan, karena pemilihan berdasarkan rekomendasi Pemkot Batu	Mengalihkan ke desa lainnya di kab/kota lain. Target pertama adalah Kab Tuban dikarenakan pemda menginginkan lebih banyak desa yang diintervensi
Rencana Aksi	Membuat perencanaan mingguan untuk memastikan kegiatan dapat dilakukan sesuai jadwal dan melakukan sinkronisasi dengan kegiatan lain.	Melakukan rapat koordinasi/komunikasi dengan Pemkot dan Kelurahan. Salah satu opsi adalah mengalihkan salah satu desa di Kota Batu ke Kota/Kabupaten lain.	Komunikasi dengan Pemda Kab Tuban yang memungkinkan menambah 1 lokus desa
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kegiatan telah terjadwal (bulanan)	Kegiatan Bimtek Kader Desa Sisir (salah satu lokus desa di Kota Batu) tidak terlaksana dengan baik karena komponen kader desa tidak lengkap.	Lokus desa di Kota Batu : 3 desa Lokus desa di Kab. Tuban : 2 desa
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Jadwal mingguan pelaksanaan kegiatan.	Pengalihan lokus salah satu kelurahan di Kota Batu ke Kab/Kota lain	Lokus desa di Kota Batu menjadi 2 desa Lokus desa di Kab. Tuban menjadi 3 desa

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 78. Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	40	40	100	Baik
Mei	60	52,5	87,5	Cukup
Juni	60	65	108,33	Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Hingga akhir triwulan II tahun 2022, progres program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah dilaksanakan adalah audiensi dan advokasi ke 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ponorogo. Setelah advokasi dan lokus ditentukan, tahapan selanjutnya adalah bimtek petugas pasar diikuti monitoring dan evaluasi tahap I. Bimtek petugas pasar dan monev tahap I telah dilaksanakan di 6 pasar yang menjadi target intervensi. Tahapan capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 108,33%, dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 79. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	10,00	35,71	Sangat Kurang
Triwulan II	65	108,33	Baik

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang hanya 10% maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian triwulan II sangat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu para Kepala Daerah menerima Tim Audiensi BBPOM Surabaya. Beberapa Kepala Daerah mempunyai agenda yang sangat padat sehingga BBPOM Surabaya menemui kesulitan mendapatkan alokasi waktu untuk melakukan audiensi.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100%	65	65	Kurang

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, program pasar pangan aman berbasis komunitas dapat dilaksanakan tanpa menemui kendala yang berarti. Salah satu kendala adalah Kota Batu yang merupakan salah satu target intervensi sedang melakukan renovasi satu satunya pasar yang ada di kota Batu. Hal ini baru diketahui pada saat audiensi dengan Walikota Batu. Pasar yang direnovasi baru akan selesai pada tahun 2024. Namun demikian, program pasar aman bahan berbahaya tetap dilaksanakan dengan pengecualian pada pasar Kota Batu tidak dilakukan penilaian unsur sarana prasarana pasar.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 81. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Salah satu pasar yang menjadi lokus kegiatan yaitu pasar Kota Batu sedang direnovasi dan baru selesai pada tahun 2024.	Petugas pasar mengalami kendala mencari sampel yang diduga mengandung bahan berbahaya.	Kegiatan Monev Tahap 1 baru dapat diselesaikan bulan Juni, karena pelaksanaan bimtek petugas pasar baru selesai dilaksanakan bulan Mei
Rekomendasi/ Perbaikan	Pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tetap dilaksanakan dengan pengecualian unsur sarana prasarana bangunan fisik pasar.	Mendata kembali pedagang yang menjual produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya untuk memastikan semua produk sudah diuji oleh petugas pasar	Percepatan penyelesaian monev tahap 1
Rencana Aksi	Tahapan pelaksanaan kegiatan pasar dilakukan di pasar relokasi.	Melakukan sampling kembali dengan berpedoman pada data yang telah diupdate dan melakukan koordinasi dengan petugas pasar untuk memberikan pemahaman bagaimana melakukan identifikasi awal produk yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya.	Prioritas kegiatan Monev tahap 1 diselesaikan bulan Juni
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	Monev belum dapat dilaksanakan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tetap dilaksanakan dengan pengecualian unsur sarana prasarana bangunan fisik pasar.	Sampling dapat dilaksanakan.	Monev dapat diselesaikan.

Sasaran Strategis 6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 82. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	21	34,16	162,67	Tidak dapat disimpulkan
Mei	29	41,44	142,88	Tidak dapat disimpulkan
Juni	37	57,22	154,64	Tidak dapat disimpulkan

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\textbf{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\textbf{Jumlah target sampel Obat}} \; x\; 100\%$$

$$B = \frac{\textbf{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\textbf{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \; x\; 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 57,22 %. Dari 1667 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan sebanyak 1259 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 154,64% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 83. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	19,55	150,42	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II	57,22	154,64	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi dan capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan II meningkat dibandingkan dengan triwulan I. Kriteria capaian tidak dapat disimpulkan di triwulan II dikarenakan target yang ditetapkan terlalu rendah, sehingga pada akhir triwulan II telah dilakukan pengusulan untuk revisi target pada triwulan III dan IV.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	57,22	57,22	Kurang

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 57,22%, **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria **kurang**. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji. Dikarenakan adanya 30 sampel yang diuji melewati timeline hingga triwulan II, maka diperkirakan target 100% tidak akan tercapai di akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran hingga triwulan II tahun 2022 jauh melampaui target. Capaian yang terlalu tinggi disebabkan oleh rendahnya target, karena perencanaan target yang ditetapkan di awal tahun belum sesuai dengan perencanaan sampel yang masuk sesuai program regionalisasi laboratorium.

Regionalisasi Laboratorium adalah pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 7 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Denpasar dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende.

Regionalisasi laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian dan efisiensi sumber daya dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM serta mendukung daya saing produk obat dan makanan. Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain Efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal hal terkait laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Banyak hal yang harus dipenuhi oleh laboratorium terkait regionalisasi, diantaranya alat, suku cadang, reagen dan kompetensi penguji, terutama bagi Balai spesifik seperti BBPOM di Surabaya, yang menguji parameter-parameter dengan menggunakan alat dengan berteknologi tinggi seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Sebelumnya frekuensi penggunaan alat-alat

berteknologi tinggi di laboratorium cukup rendah, dengan adanya regionalisasi laboratorium frekuensi penggunaan akan meningkat dan membutuhkan reagen dengan grade khusus serta suku cadang yang lebih banyak.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 85. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Seluruh sampel Obat telah dikerjakan sesuai dengan pedoman sampling, namun ada beberapa sampel yang melewati timeline disebabkan sulitnya mencari kondisi KCKT dan adanya sampel TMS sehingga membutuhkan uji konfirmasi • Masih terdapat sampel regionalisasi yang salah kirim / tidak sesuai dengan renlak, kompetensi penguji terkait parameter spesifik regionalisasi laboratorium belum siap	• Seluruh sampel Obat dikerjakan sesuai dengan pedoman sampling, namun masih terdapat sampel yang melewati timeline disebabkan antara lain : • Sulit mencari kondisi KCKT yaitu pada komoditi obat : domperidon, omeprazol dan dimenhidrinat • Alat microwave pada laboratorium kosmetik rusak sehingga harus bergantian penggunaannya dengan laboratorium pangan	• Seluruh sampel Obat dikerjakan sesuai dengan pedoman sampling, namun masih terdapat sampel yang melewati timeline disebabkan antara lain : • Sulit mencari kondisi KCKT yaitu pada komoditi obat : domperidon, omeprazol dan dimenhidrinat karena jumlah sampel regionalisasi jenis ini cukup banyak yang masuk • Alat microwave pada laboratorium kosmetik rusak sehingga harus bergantian penggunaannya dengan laboratorium pangan
Rekomendasi Perbaikan	• Dilakukan penelusuran penyebab sulitnya pencarian kondisi uji untuk komoditi obat • Kendala terkait regionalisasi disampaikan pada rapat monev regionalisasi	• Kesulitan mencari kondisi sampel komoditi obat karena kondisi kolom yang jenuh, sehingga dibutuhkan penambahan kolom untuk komoditi tersebut • Dilakukan perbaikan microwave laboratorium kosmetik	• Sudah dilakukan pembelian kolom, namun tidak dapat langsung diterima karena indent • dilakukan optimalisasi anggaran untuk pengadaan mainboard Microwave
Rencana Aksi	• Pengatasan penyebab sulitnya pencarian kondisi, bila terkait kolom, maka diusulkan pengadaan kolom, atau perbaikan alat bila permasalahan pada alat • Berkoordinasi melalui wag dan penyampaian pada rapat monev regionalisasi	• Dilakukan identifikasi kolom apa yang dibutuhkan serta jumlahnya sehingga dapat dialokasikan anggaran tambahan untuk pengadaannya • Menghubungi provider alat microwave untuk identifikasi kerusakan dan biaya yang diperlukan unuk perbaikan	• Mengupdate kemampuan laboratorium penguji obat BBPOM Surabaya pada grup regionalisasi agar sampel dengan parameter domperidon, dimenhidrinat dan omeprazol tidak disampling terlebih dahulu sampai kolom yang dibeli telah tersedia • Melakukan pengadaan mainboard microwave dengan anggaran hasil optimalisasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Terdapat sampel melewati timeline	Terdapat sampel melewati timeline	Terdapat sampel melewati timeline
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : • telah teridentifikasi parameter2 yang sampel komoditi obat yang sulit mendapatkan kondisi sampel salah kirim / tidak sesuai renlak sudah menurun	Kondisi Juni : • Telah didapatkan penawaran untuk kolom2 yang diperlukan untuk menunjang pengujian domperidon, dimenhidrinat dan omeprazol	Kondisi Juli : • Telah didapatkan penawaran untuk kolom2 yang diperlukan untuk menunjang pengujian domperidon, dimenhidrinat dan omeprazol

Keterangan	April	Mei	Juni
		Telah didapatkan penawaran untuk perbaikan microwave, perlu penggantian main board dengan harga estimasi Rp 170.000.000	• Telah dilakukan pengadaan mainboard microwave, namun barang masih dalam posisi inden

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 86. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	27	34,36	127,25	Tidak dapat disimpulkan
Mei	36	43,44	120,68	Tidak dapat disimpulkan
Juni	43	54,29	126,27	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\textbf{Jumlah target sampel Makanan}} \; x\; 100\%$$

$$B = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \; x\; 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). BBPOM di Surabaya termasuk laboratorium regional VII dengan koordinator BBPOM di Denpasar.

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 adalah 54,29%. Dari 655 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan

sebanyak 546 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 126,27% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 87. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	20,21	118,87	Sangat Baik
Triwulan II	54,29	126,27	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan II meningkat dibandingkan dengan triwulan I. Kriteria capaian tidak dapat disimpulkan di triwulan II dikarenakan target yang ditetapkan terlalu rendah, sehingga pada akhir triwulan II telah dilakukan pengusulan untuk revisi target pada triwulan III dan IV.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	54,29	54,29	Kurang

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 54,29%, **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria **kurang**. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji. Dikarenakan adanya 6 sampel yang diuji melewati timeline hingga triwulan II, maka diperkirakan target 100% tidak akan tercapai di akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian presentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 sudah melampaui target. Capaian yang tinggi disebabkan perencanaan target yang ditetapkan di awal tahun maupun target regionalisasi laboratorium untuk komoditi makanan tidak berbeda jauh.

Regionalisasi laboratorium merupakan pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Dengan regionalisasi laboratorium

diharapkan adanya efisiensi biaya dan waktu waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh laboratorium terkait regionalisasi, diantaranya alat, suku cadang, reagen dan kompetensi penguji, terutama bagi Balai spesifik seperti BBPOM di Surabaya. Pada Akhir bulan Juni telah dilaksanakan bimtek internal penetapan kadar residu kloramfenikol pada olahan ikan dan madu. Parameter ini merupakan parameter uji spesifik laboratorium pangan Balai Besar POM di Surabaya.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 89. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Tidak terdapat permasalahan yang berarti, sampel pangan diuji sesuai dengan pedoman sampling dan seluruhnya memenuhi time line	Tidak terdapat permasalahan yang berarti, sampel pangan diuji sesuai dengan pedoman sampling dan seluruhnya memenuhi time line	Seluruh sampel Pangan dikerjakan sesuai dengan pedoman sampling, namun ada beberapa sampel yang melewati timeline disebabkan adanya sampel TMS sehingga membutuhkan uji konfirmasi
Rekomendasi Perbaikan	-	-	Sampel dengan hasil uji TMS harus dilakukan uji ulang/konfirmasi oleh penguji lain
Rencana Aksi	-	-	Dilakukan pengisian form Hasil Uji di Luar Spesifikasi untuk memastikan validitas hasil uji
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	Terdapat sampel melebihi timeline
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Kondisi Juni : Alat piercing apparatus telah tersedia di Lab Pangan Balai Besar POM di Surabaya	Kondisi Juli : -

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 90. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	20	21,667	108,33	Baik
Mei	25	24,524	98,10	Baik
Juni	30	31,25	104,17	Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :
a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)
Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)
Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.
Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 adalah 31,25. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di

Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,17% dan mendapat kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 91. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	17,857	119,05	Sangat Baik
Triwulan II	31,25	104,17	Baik

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan II meningkat dibandingkan dengan triwulan I sedangkan capaiannya menurun dengan kriteria baik. Peningkatan realisasi terjadi seiring dengan penambahan realisasi jumlah perkara dari 3 di triwulan I menjadi 8 ditriwulan II.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	31,25	45,96	Sangat Kurang

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria “sangat kurang”. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Sampai dengan triwulan II tahun 2022 telah tercapai 8 (delapan) perkara dengan rincian realisasi perkara SPDP sebanyak 7 (tujuh) perkara dan sedang dalam proses pemberkasan (telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi) serta 1 (satu) perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21). Sedangkan realisasi perkara carry over sebanyak 4 (empat) perkara dengan rincian tahap 1 sebanyak 1 (satu) perkara, P21 sebanyak 1 (satu) perkara dan tahap 2 sebanyak 2 (dua) perkara.
- Terdapat 8 perkara yang sudah P21 namun belum dapat dilakukan tahap 2, dengan rincian perkara tahun 2022 sebanyak 1 (satu) perkara dan perkara carry over sebanyak 7 (tujuh) perkara. Tahap 2 belum dapat dilakukan karena beberapa kendala antara lain tersangka melarikan diri, tersangka

sakit, tersangka sedang melaksanakan ibadah haji, tersangka sedang ditahan oleh Polda Jawa Timur karena tersangkut perkara lain.

- Masih terdapat 17 (tujuh belas) perkara carry over dengan rincian 14 (empat belas) perkara carry over tahun 2014-2020 dan 3 (tiga) perkara carry over tahun 2021. Perkara carry over tersebut sedang dalam proses penyelesaian/upaya tindak lanjut.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempuranaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 93. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	- Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir). - Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan. - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut	- Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir). - Adanya tersangka yang akan dilakukan tahap 2 ke Kejati namun tertunda karena tersangka sedang melaksanakan ibadah haji. - Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan. - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut	- Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir). - Adanya tersangka yang akan dilakukan tahap 2 ke Kejati namun tertunda karena tersangka sedang melaksanakan ibadah haji. - Adanya tersangka yang akan dilakukan tahap 2 ke Kejati namun tertunda karena tersangka ditahan oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur (sedang dalam proses perkara Polda). - Penyelesaian pemberkasan perkara tahun 2022 - Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut
Rekomendasi Perbaikan	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. - Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. - Penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. - Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. - Melakukan kegiatan penindakan, melakukan gelar kasus, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. - Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri. - Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Keterangan	April	Mei	Juni
Rencana Aksi	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. - Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. - Penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. - Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri.	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. - Melakukan kegiatan penindakan, melakukan gelar kasus, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. - Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri. - Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE dan Obat-Obat Tertentu yang ditemukan di ekspedisi.	Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE dan Obat-Obat Tertentu yang ditemukan di ekspedisi.	Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei: - Menghadiri sidang sebagai saksi di Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk perkara OT TIE. - Telah diterima surat P21 (berkas perkara telah dinyatakan lengkap) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. - Telah diterima surat P21A dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk perkara tersangka yang sedang melaksanakan ibadah haji, tahap 2 akan dilaksanakan setelah tersangka selesai melaksanakan ibadah haji.	Kondisi Juni: - Telah dilakukan kegiatan penindakan dan gelar kasus dengan tindak lanjut pro Justitia. - Telah dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. - Telah dilakukan pengiriman permohonan penetapan geledah dan penyitaan ke Pengadilan Negeri. - Telah dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur untuk perkara Obat-Obat Tertentu yang ditemukan di ekspedisi.	Kondisi Juli: -

Sasaran Strategis 8
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 94. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT

Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 8%), Penataan Tatalaksana (bobot 7%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 10%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%).

Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Nilai Survey Persepsi Korupsi (bobot15%), Persentase temuan hasil pemeriksaan (5%), Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) (15%).

Hingga triwulan II tahun 2022, belum diperoleh nilai indeks RB dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP, sedangkan nilai yang diusulkan sesuai penilaian mandiri adalah 95,64.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan II belum dapat dibandingkan dengan triwulan I karena penilaian hanya dilaksanakan 1 kali di akhir tahun 2022

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 95. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,20	-	-	-

Belum ada realisasi indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil memperoleh predikat WBBM. Namun demikian, tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan predikat WBBM dan upaya mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Hingga triwulan II tahun 2022 telah dilakukan penilaian LKE ZI oleh TPI namun belum ada nilai resmi yang dikeluarkan oleh APIP. BBPOM Surabaya telah melakukan upaya pengembangan dari 29 inovasi yang telah diciptakan menjadi 31 inovasi. Terdapat penambahan inovasi Farmasi class, Jatim Glowing, dan Silaskar, namun ada juga penghapusan inovasi SPIKU (spesifik IKU) karena sudah tidak relevan dengan ditambahkannya IKU terkait UMKM untuk UPT di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa pengembangan dari inovasi sebelumnya antara lain pengembangan GEMPUR JATIM (berkolaborasi semakin luas dengan beberapa kepala daerah dan perekrutan fasilitator dari daerah), pengembangan RAPORKU (merubah mekanisme penilaian dari 2 aspek menjadi 3 aspek), pengembangan aplikasi Teman Odin (menambah fitur persediaan dan aset), penyelesaian aplikasi SILASKAR (layanan saksi ahli). Penyesuaian dengan Permenpan no.90 tahun 2021 juga dilakukan dengan menambahkan kegiatan prioritas pada aspek reform di semua area perubahan. Hasil survei indeks persepsi RB BBPOM di Surabaya tahun 2022 adalah 3,916 sedangkan hasil survey indeks budaya organisasi adalah 3,891. Pada bulan Juni, inovasi GEMPUR JATIM telah berhasil meraih predikat top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di

Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya inovasi GEMPUR JATIM sedang diperjuangkan untuk meraih top 45 inovasi pelayanan publik.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 96. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Inovasi farmasi class belum dapat dilaksanakan karena blokir anggaran sehingga tidak ada dana yang bisa direvisi	inovasi Gempur Jatim masuk sebagai Finalis Top KIPP 99, namun masyarakat belum banyak mengenal Gempur Jatim	Aplikasi silaskar belum ada progres
Rekomendasi Perbaikan	Menunggu pembukaan blokir anggaran, sementara dilakukan pematangan rencana	Branding Gempur Jatim	Segera kordinasi antara penindakan dan tim IT
Rencana Aksi	Koordinasi untuk pelaksanaan inovasi farmasi class	Mengadakan pertemuan dengan AOC, membagi menjadi 4 tim dengan masing masing tim diberi target membuat konten branding gempur jatim	Koordinasi antara penindakan dan tim IT, ditunjuk Aflah dan Faris untuk mengawal aplikasi silaskar
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Inovasi farmasi class belum dapat dilaksanakan	belum ada konten gempur jatim	aplikasi silaskar belum selesai dibangun
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : Inovasi farmasi class belum dapat dilaksanakan	Kondisi Juni : '- banyak konsumen menanyakan cara mengikuti gempur jatim - semua medsos sudah berisi konten gempur jatim	Kondisi Juli : -

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 97. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 98. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90-100	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja (30%), (2) Pengukuran Kinerja (30%), (3) Pelaporan Kinerja (15%), (4) Evaluasi AKIP (25%). Hingga triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi Nilai AKIP dari APIP.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan II belum dapat dibandingkan dengan triwulan I karena penilaian hanya dilaksanakan 1 kali di akhir tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 99. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,10	-	-	-

Belum ada realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 82,79 (A), namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut atau bahkan meningkatkan nilai tersebut di tahun 2022. Hingga triwulan II tahun 2022, telah dilakukan upaya penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi simakin yang sudah menunjukkan cascading kinerja dari eselon 2 dalam hal ini Kepala Balai ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja. Pada SKP tersebut sudah terdapat indikator individu yang selaras dengan indikator kinerja ketua tim. Hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi APIP di tahun 2021 untuk menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai level individu. Semua rekomendasi APIP terhadap pelaksanaan SAKIP tahun 2021 telah ditindaklanjuti.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 100. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Data pengujian laboratorium regional masih belum jelas	Masih ada 4 indikator dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan	Realisasi IKU bulan Juni lebih tinggi dari usulan revisi target RAPK bulan Juli
Rekomendasi Perbaikan	Koordinasi Intensif dengan balai anggota regional Denpasar	Mengkomunikasikan kemungkinan perubahan target RAPK bulanan ke roren	Mengkomunikasikan kepada roren untuk revisi target RAPK
Rencana Aksi	Masing- masing penyelia berkoordinasi Intensif dengan balai anggota regional Denpasar untuk merekap data hasil uji	Membuat surat usulan revisi target RAPK tw 3 dan 4	Berkomunikasi dengan roren terkait perubahan revisi target RAPK
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	RAPK pengujian di balai lain belum terisi	Surat usulan revisi target RAPK belum disusun	Realisasi IKU bulan Juni lebih tinggi dari usulan revisi target RAPK bulan Juli
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei Data RAPK pengujian sampel di balai lain sudah terisi	Kondisi Juni : Surat Usulan revisi target RAPK bulanan sudah terkirim ke roren	Kondisi Juli : -

Sasaran Strategis 9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. **Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya**

Tabel 101. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Hingga triwulan II tahun 2022 belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya**.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya triwulan II belum dapat dibandingkan dengan triwulan I karena penilaian hanya dilaksanakan 1 kali di akhir tahun 2022.

c. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 102. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25	-	-	-

Belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN hingga triwulan II tahun 2022 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan II tahun 2022 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penyusunan SKP hingga triwulan II. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Terdapat peningkatan pegawai yang sudah memenuhi target 20 JP, dari 28% di triwulan I menjadi 87% pegawai atau 118 dari 141 pegawai di triwulan II.

Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi Covid-19, dilakukan apel *online* via zoom setiap senin dan kamis (inovasi apel manis) untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu kinerja pegawai, diterapkan juga mekanisme *reward* dan *punishment* pegawai, dimana pegawai yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan pegawai teladan dengan diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. Sedangkan untuk pegawai yang berkinerja terendah diberikan sertifikat pegawai berkinerja terendah untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 103. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Terdapat pegawai yang belum berkinerja sesuai jenjang fungsionalnya	• beberapa pegawai memiliki permasalahan psikologi yang berpengaruh kepada kinerja	• Capaian JP pegawai masih 87%
Rekomendasi Perbaikan	• Diberikan pembinaan dan SKP dinilai sesuai kinerja individu	• Bersurat kepusat untuk meminta pendampingan psikologi kepada seluruh pegawai	• Monev JP diumumkan secara berkala
Rencana Aksi	• Pembinaan kepada pegawai yang belum berkinerja baik, dan pemberian punishment pengurangan tukin 20% karena nilai SKP cukup	• Meminta pusat untuk melaksanakan asesment psikologi kepada seluruh pegawai	• Monev JP diumumkan secara berkala di WAG Balai
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Belum dilakukan pembinaan dan penilaian SKP	• Belum ada pendampingan psikologi	• Capaian JP pegawai masih 87%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Kondisi Mei : - Pegawai tersebut sudah diberikan pembinaan dan mendapat punishment pengurangan tukin 20% karena nilai SKP cukup	• Kondisi Juni : - Telah dilaksanakan asesment psikologi, sosialisasi terkait psikologi, dan konseling psikologi kepada beberapa pegawai	Kondisi Juni :

Sasaran Strategis 10
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 104. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2022

BULAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
April 2022	-	-	-	-
Mei 2022	-	-	-	-
Juni 2022	-	82,34	-	-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar

Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium tahun 2022 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada TW II 2022 hasil audit sementara terhadap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Surabaya adalah 82,34%. Nilai ini diperoleh dari rata-rata nilai pemenuhan standar ruang lingkup 83%, pemenuhan kompetensi 85,41% dan pemenuhan peralatan 78,62%

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP di triwulan II belum dapat dibandingkan dengan triwulan I karena tidak ada target yang ditetapkan setiap bulannya. Namun demikian telah dilakukan audit setiap triwulan untuk memantau progres nilai dengan hasil meningkat, yaitu dari 80,70% di triwulan I menjadi 82,34% di triwulan II.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83	82,34	99,20%	Baik

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan II tahun 2022 sebesar 82,34%, **hampir mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria **baik**. Diharapkan triwulan-triwulan berikutnya standar kompetensi laboratorium dapat meningkat sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan adanya Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula

dengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. BBPOM di Surabaya senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan pada triwulan II untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.
- Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 106. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Terdapat beberapa parameter uji baru pada SKL terkait regionalisasi lab dimana pengujian tersebut belum pernah dilakukan	Terdapat beberapa parameter uji baru pada SKL terkait regionalisasi lab dimana pengujian tersebut belum pernah dilakukan	Pemenuhan SRL belum sesuai dengan rencana karena sampel belum masuk
Rekomendasi Perbaikan	Pelatihan untuk pemenuhan kompetensi	Pelatihan untuk pemenuhan kompetensi	Merencanakan sampel untuk pemenuhan SRL
Rencana Aksi	Mengusulkan pelatihan kepada P3OMN untuk pemenuhan kompetensi	Mengusulkan pelatihan kepada P3OMN untuk pemenuhan kompetensi	berkoordinasi dengan poksi inspeksi untuk melakukan sampling sampel dalam rangka pemenuhan SRL
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Parameter uji baru terkait parameter uji sesuai regionalisasi laboratorium belum dilakukan	Parameter uji baru terkait parameter uji sesuai regionalisasi laboratorium belum dilakukan	Pemenuhan SRL belum sesuai dengan rencana karena sampel belum masuk
Kondisi Setelah Rencana Aksi	kondisi Mei : Telah dilakukan pengusulan kepada P3OMN sebagai narasumber	kondisi Juni: Telah dilakukan pelatihan oleh P3OMN kepada lab Pangan, Lab Obat dan Lab Mikrobiologi pada akhir Juni 2022	Kondisi Juli : -

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 107. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
April	2,5	2,2	88	Cukup
Mei	2,5	2,2	88	Cukup

BULAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Juni	2,5	2,6	104	Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

   Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracuanan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email*, *sharing folder*, *dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Hingga triwulan II tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 2,6**.** Capaian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 104% atau **berhasil mencapai target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 108. Perbandingan realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	2,2	88	Cukup
Triwulan II	2,6	104	Baik

Realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal di triwulan II meningkat dibandingkan dengan triwulan I dipengaruhi meningkatnya nilai pemanfaatan SIPT.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 109. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5	2,6	104	Baik

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan II tahun 2022 **sudah mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria baik. Capaian ini harus dipertahankan hingga akhir tahun dan masih dapat ditingkatkan lagi dengan monitoring secara intensif.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator hingga triwulan II tahun 2022 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan *Email*	Pemanfaatan *Sharing folder*	Pemanfaatan *Dashboard* BCC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
2	3	3	3	3	3	2,6

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi triwulan II sudah mencapai target yang ditetapkan, hanya komponen pemutakhiran SIPT yang belum mendapat nilai 3, sedangkan nilai komponen lainnya sudah mendapat nilai maksimal. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan monev *input* SIPT setiap bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu

- meningkatkan akses *email* pegawai dengan mentautkan Absensi *Online* "SIKEMAH" dengan halaman *login email* pom.go.id, serta mengirim *email* pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui *email* pom.go.id dengan permintaan untuk *reply*.
- Tetap rutin melakukan upload berita aktual dengan target 30 berita dalam 1 triwulan

e. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 110. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	- input SIPT pemeriksaan sarana masih 31,3% sehingga nilai indeks SIPT masih 1 - nilai indeks total sementara masih dibawah target, yaitu 2,2	- input SIPT pengujian masih 0, data LHU belum sampai ke Kabalai - Komoditas Kosmetik baru dapat diakses 15 Mei 2022 namun kemudian terdapat maintenance 26 Mei – Juni 2022 Penomoran manual dan SIPT tidak sinkron. Komoditas OT : Perameter wajib di master data belum sesuai	- Data pemeriksaan sarana yang diinput ke SIPT hingga 30 Juni baru 74%
Rekomendasi Perbaikan	- percepatan pengisian SIPT pemeriksaan sarana	Berkoordinasi dengan Pusdatin	- Semua petugas Inspeksi harus off dinas luar 1 hari dalam seminggu untuk menyelesaikan input SIPT dan sharing knowledge
Rencana Aksi	- penyelesaian input SIPT pemeriksaan sarana diluar jam kerja	Berkoordinasi dengan Pusdatin via WA grup	- Semua petugas Inspeksi off dinas luar pada hari senin untuk menyelesaikan input SIPT
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- indeks input SIPT pemeriksaan sarana 31,3% - masih ada 22 orang yang belum aktif menggunakan email corporate	- input SIPT pengujian masih 0, data LHU belum sampai ke Kabalai	- Data pemeriksaan sarana yang diinput ke SIPT hingga 30 Juni baru 74%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei : - indeks input SIPT pemeriksaan sarana 64,65 - hanya 2 orang saja yang belum aktif menggunakan email corporate	Kondisi Juni : - SIPT pengujian terinput 8%, namun belum masuk penilaian indeks pengelolaan data dan informasi	Kondisi Juli : -

Sasaran Strategis 11
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

a. **Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya**

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2022

Tabel 111. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
April	30	65,60	218,66	Tidak dapat disimpulkan
Mei	50	67,33	134,67	Tidak dapat disimpulkan
Juni	55	71,60	130,17	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang awalnya memuat 13 (tiga belas) indikator berubah menjadi 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 adalah 71,60, diperoleh dari nilai IKPA 56,94 dan nilai EKA 93,58. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan II tahun 2022 **jauh melampaui target** yang ditetapkan yaitu 130,17% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan** .

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 112. Perbandingan realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I dan II tahun 2022

TRIWULAN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	66,79	445,28	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II	71,6	130,17	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya di triwulan II meningkat dibandingkan dengan triwulan I sedangkan capaiannya menurun dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini terjadi karena target bulanan yang ditetapkan terlalu rendah. Telah dilakukan upaya pengusulan revisi menaikkan target bulanan untuk triwulan III dan IV kepada Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 113. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94	71,60	76,17	Cukup

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria cukup. Perlu dilakukan perbaikan dengan memaksimalkan penyerapan anggaran supaya sesuai target agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian nilai kinerja anggaran hingga triwulan II tahun 2022 sudah jauh melampaui target. Capaian yang terlalu tinggi disebebkan oleh rendahnya target, karena perencanaan target ditetapkan dengan asumsi memakai metode perhitungan IKPA yang lama. Pada bulan Maret baru disosialisasikan mengenai perubahan indikator penilaian IKPA oleh Kementrian keuangan, yang semula 13 indikator menjadi 8 indikator saja. Capaian nilai kinerja anggaran juga dipengaruhi oleh masih rendahnya nilai penyerapan anggaran dan capaian output pada komponen IKPA yang disebabkan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai POA terutama pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat, dan capaian output yang lebih kecil dari penyerapan anggaran sehingga nilainya tidak sempurna.

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	77.51	100.00	100.00	99.10	100.00	92.68	93.58	100%	93.58
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	10.00	15.50	10.00	10.00	9.91	5.00	23.17			
	Nilai Aspek	100.00		95.32					92.68			

Nilai EKA hingga triwulan II tahun 2022 adalah 56,94 dengan komponen nilai penyerapan 37,78; konsistensi 95,68; capaian RO 16,69; efisiensi 20; dan nilai efisiensi 100. Tingginya nilai efisiensi

dikarenakan capaian output lebih tinggi daripada penyerapan anggaran, namun capaian output masih rendah dibandingkan target 1 tahun.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 114. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Gap realisasi anggaran dengan target tw 2 sebesar 25,32% (Rp. 14.201.808.689,-), bila target tidak tercapai berpengaruh pada nilai IKPA	- Gap realisasi anggaran dengan target tw 2 sebesar 15,84% (Rp. 8.885.578.177,-), bila target tidak tercapai berpengaruh pada nilai IKPA - KIE dengan tokoh masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena perlengkapan KIE belum dilelang	Penyerapan anggaran belum mencapai target penyerapan triwulan II
Rekomendasi Perbaikan	- Percepatan proses kontrak pengadaan barang dan jasa bisa dengan pemakaian ecatalog - Menyusun rencana penarikan halaman 3 dipa untuk tw 2 sebesar 40% saja karena sesuai perhitungan POA, target penyerapan 48,74% tidak akan tercapai, dengan demikian salah satu komponen IKPA terkait deviasi halaman 3 DIPA masih bisa mendapat nilai 100	- Segera melaksanakan lelang perlengkapan peserta KIE dengan target Juni sudah kontrak	- Berkomunikasi secara intensif dengan tokoh masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan KIE di bulan Juli sejalan dengan pengadaan perlengkapan peserta KIE
Rencana Aksi	- Revisi anggaran pengadaan alat lab menjadi ecatalog - Mengajukan revisi rencana penarikan halaman 3 DIPA sebesar 40%	- Memulai Lelang di bulan Mei	- Merencanakan pelaksanaan KIE sebanyak 23 titik di bulan Juli
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Realisasi anggaran sampai 30 April 2022 adalah Rp.12.385.584.764,- atau 22,08% - Nilai IKPA 88,26	- Realisasi anggaran 31 Mei 2022 adalah Rp.15.954.363.130,- atau 28,45% - Nilai IKPA 90,87 - Lelang perlengkapan peserta KIE belum dimulai	- Realisasi anggaran sampai 30 Juni 2022 adalah Rp.21.186.948.313,- atau 37,78% - Realisasi KIE hingga 30 Juni sebanyak 23 titik
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Mei - Realisasi anggaran 31 Mei 2022 adalah Rp.15.954.363.130,- atau 28,45% - Nilai IKPA naik menjadi 90,87	Kondisi Juni - Realisasi anggaran sampai 30 Juni 2022 adalah Rp.21.186.948.313,- atau 37,78% - Nilai IKPA naik menjadi 93,58 - Lelang perlengkapan peserta KIE sdh dilaksanakan	Kondisi Juli -

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.3.687.444.000,- (tiga milyar

enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran hingga triwulan II tahun 2022 adalah Rp 21.186.948.313,- atau 37,78%.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian *input* yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2022 triwulan II sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 115. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,11	EFISIEN
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1,70	EFISIEN
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3,03	EFISIEN
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,8	EFISIEN
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	1,11	EFISIEN
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	EFISIEN
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	EFISIEN
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0,01	EFISIEN
9.	Layanan Umum	0,44	EFISIEN
10.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,07	EFISIEN
11.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	1,03	EFISIEN
12.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1,63	EFISIEN
13.	Desa Pangan Aman	0,24	EFISIEN
14.	Pasar aman dari bahan berbahaya	1,16	EFISIEN
15.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	-0,02	TIDAK EFISIEN
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	-0,49	TIDAK EFISIEN
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	0,67	EFISIEN
18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	0,49	EFISIEN
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	0,47	EFISIEN
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1,09	EFISIEN

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	EFISIEN
22	Layanan Perkantoran	0,00	EFISIEN

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan tidak efisien dan 20 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,49 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM) hingga 3,03 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis 2021-2024. Sesuai Reviu Renstra 2020-2024, BBPOM di Surabaya mempunyai 11 sasaran strategis dengan 29 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator pada triwulan II tahun 2022, telah dilakukan 22 kegiatan utama.

2. Dari 11 sasaran strategis, hanya 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 5 sasaran strategis lainnya baru bisa dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM. Dari 6 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 4 sasaran strategis memperoleh capaian "BAIK" dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN".
3. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
   f. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 99,04% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;
   g. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan II tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
   h. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan II tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya;
   i. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 106,74% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;
   j. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 106,54% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;
   k. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 140,45% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan II dalam

meningkatkan efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya;

l. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 104,17% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022;

m. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal;

n. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal ;

o. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;

p. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 130,17% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan II dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel.

3. Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan II tahun 2022 antara 89,47% sampai dengan 154,64%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" disebabkan karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan produk obat dan makanan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" sebesar 154,64%, hal ini disebabkan karena target yang terlalu rendah di triwulan II, sehingga akan dilakukan revisi target triwulan 3 dan 4.
4. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan tidak efisien (KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT dan Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM) dan 20 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,49 hingga 3,03 (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

4.2 Saran

1. Dari 20 indikator kinerja yang bisa dievaluasi, masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target triwulan II yaitu indikator "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" disebabkan karena masih banyak penandaan sampel yang tidak memnuhi ketentuan sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan pembinaan intensif kepada pelaku usaha terkait penandaan label produk obat dan makanan sehingga diharapkan realisasi bisa meningkat di triwulan 3 dan 4.
2. Masih ada 4 indikator yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan capaian triwulan II tidak dapat disimpulkan karena penentuan target bulanan yang terlalu rendah, sehingga perlu segera menindaklanjuti dengan mengusulkan revisi target bulanan pada triwulan 3 dan 4.

LAMPIRAN

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Surabaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,16 Desember 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Surabaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.6
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.7
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77.09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.5
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.92

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87.2
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	84.1
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp. 56,083,984,000.00

Surabaya,16 Desember 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	626.084.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	299.032.800, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	156.521.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	154.047.200, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	73.957.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												79	260.000.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												84.7	180.260.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												77.09	350.000.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90.5	111.519.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	48.860.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	468.944.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	870.278.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	473.668.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	876.011.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM							4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	111.519.000, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	25	33	33	41	50	58	66	75	83	91	60	390.696.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	8.561.400.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		5	15	20	25	40	50	60	75	90	95	76	785.661.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman		5	15	20	25	35	40	47.5	65	70	85	28	1.195.660.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	13	21	29	37	47	57	67	77	87	100	782.605.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		8	17	27	36	43	53	63	73	83	93	100	453.080.000, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	68	1.540.316.000, 00
23.	Indeks RB UPT												87.2	26.311.506.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												84.1	367.340.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.25	181.550.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												83	9.346.530.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	462.840.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		5	15	30	50	55	60	65	70	75	80	94	39.600.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	28	40	60	60	70	70	80	90	90	18	604.499.000, 00
Total														56.083.984.000, 00

Surabaya, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Surabaya

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ★ DI SURABAYA ★

BADAN POM

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Penetapan target indikator di bawah ini :

a. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

b. Jumlah desa pangan aman

c. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA

BADAN POM

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.12.21.1150 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.15A.15A5. 04.21.1146 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5. 12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

RUSTYAWATI

LAMPIRAN
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6.	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	84,7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya		pengawasan Obat dan Makanan	
		8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,45
		16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
			pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19.	Jumlah desa pangan aman	28
		20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24.	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		25.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium,	27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	83

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		dan Makanan sesuai standar GLP	
		28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

RUSTYAWATI

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2022
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
A	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	7	50,00	417.964.000	187.756.218	44,92
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	18310	9069	49,53	1.398.570.000	256.953.000	18,37
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	104	0	69,86	390.696.000	67.660.000	17,32
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	50,00	1.289.740.000	230.520.052	17,87
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	50	22	44,00	260.000.000	54.135.000	20,82
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	8,01	587.511.000	47.086.650	8,01
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	0	90,18	137.000.000	123.542.000	90,18
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	200.000.000	197.202.400	98,60
9.	Layanan Umum	1	1	50,00	753.448.000	260.855.474	34,62
10.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	50,00	3.000.000.000	725.283.728	24,18
11.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	11	8	72,73	1.122.352.000	401.638.000	35,79
12.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	0	40,01	785.661.000	119.338.700	15,19
13.	Desa Pangan Aman	28	0	41,67	1.195.660.000	402.963.300	33,70
14.	Pasar aman dari bahan berbahaya	18	0	65	604.499.000	181.946.029	30,10
15.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	24300	5614	23,10	8.911.400.000	2.107.793.594	23,65
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	972	396	40,74	906.160.000	720.733.244	79,54
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2557	1104	43,18	1.565.210.000	404.192.509	25,82
18.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	134	95	70,90	73.957.000	35.120.750	47,49
19.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	440	257	58,41	487.128.000	193.752.000	39,77
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	774	480	62,02	986.541.000	293.363.932	29,74

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM						
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	37,10	6.146.530.000	2.280.210.265	37,10
22	Layanan Perkantoran	1	1	55,23	24.863.957.000	13.733.402.737	55,23

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TRIWULAN I TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
		%	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	50,00	44,92	1,11	0,11	100 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	49,53	18,37	2,70	1,70	78 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	69,86	17,32	4,03	3,03	75 %
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	50,00	17,87	2,80	1,8	78 %
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	44,00	20,82	2,11	1,11	86 %
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	8,01	8,01	1,00	0,00	75 %
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	90,18	90,18	1,00	0,00	100 %
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100,00	98,60	1,01	0,01	100 %
9	Layanan Umum	50,00	34,62	1,44	0,44	92 %
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	50,00	24,18	2,07	1,07	86 %
11	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	72,73	35,79	2,03	1,03	86 %
12	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40,01	15,19	2,63	1,63	78 %
13	Desa Pangan Aman	41,67	33,70	1,24	0,24	95 %
14	Pasar aman dari bahan berbahaya	65	30,10	2,16	1,16	86 %
15	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	23,10	23,65	0,98	-0,02	75 %
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	40,74	79,54	0,51	-0,49	75 %
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	43,18	25,82	1,67	0,67	90 %
18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	70,90	47,49	1,49	0,49	92 %
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	58,41	39,77	1,47	0,47	92 %
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	62,02	29,74	2,09	1,09	86 %
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	37,10	37,10	1,00	0,00	100 %
22	Layanan Perkantoran	55,23	55,23	1,00	0,00	75 %

LAMPIRAN 2
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni											CAPAIAN INDIKATOR RAPK		
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	RAPK s,d Juni (Jan-Juni)		
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*				pembilang	Penyebut	capaian
1	Obat	Random	Surabaya	585	345	0	0	0	50	345	261	226	35	35	84	261			
			Kabupaten Kediri	42	18	0	0	0	0	18	13	13	0	0	5	13			
			Kabupaten Jember	62	31	0	0	0	0	31	21	21	0	0	10	21			
			TOTAL	689	394	0	0	0	50	394	295	260	35	35	99	295			
		Targeted	Surabaya	146	53	0	0	0	9	53	37	32	5	5	16	37			
			Kabupaten Kediri	11	7	0	0	0	0	7	5	5	0	0	2	5			
			Kabupaten Jember	16	8	0	0	0	0	8	7	7	0	0	1	7			
			TOTAL	173	68	0	0	0	9	68	49	44	5	5	19	49			
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		862	462	0	0	0	59	462	344	304	40	40	118	344			
2	Obat Tradisional	Random	Surabaya	384	224	0	0	0	11	224	184	170	14	14	40	184			
			Kabupaten Kediri	30	16	0	0	0	4	16	13	10	3	3	3	13			
			Kabupaten Jember	41	21	0	0	0	6	21	16	11	5	5	5	16			
			TOTAL	455	261	0	0	0	21	261	213	191	22	22	48	213			
		Targeted	Surabaya	164	91	0	0	0	11	91	62	48	14	14	29	62			
			Kabupaten Kediri	13	5	0	0	0	0	5	4	4	0	0	1	4			
			Kabupaten Jember	18	8	0	0	0	2	8	6	4	2	2	2	6			
			TOTAL	195	104	0	0	0	13	104	72	56	16	16	32	72			
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		650	365	0	0	0	34	365	285	247	38	38	80	285			
3	Obat Kuasi	Random	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Kediri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Jember		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Targeted	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Kediri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Jember		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Suplemen Kesehatan	Random	Surabaya	102	53	0	0	0	0	53	42	42	0	0	11	42			
			Kabupaten Kediri	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Jember	11	5	0	0	0	2	5	4	3	1	1	1	4			
			TOTAL	121	58	0	0	0	2	58	46	45	1	1	12	46			
		Targeted	Surabaya	44	24	0	0	0	1	24	14	13	1	1	10	14			
			Kabupaten Kediri	3	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1			
			Kabupaten Jember	5	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1			
			TOTAL	52	28	0	0	0	1	28	16	15	1	1	12	16			
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		173	86	0	0	0	3	86	62	60	2	2	24	62			
5	Kosmetik	Random	Surabaya	767	459	2	0	0	94	457	362	275	87	89	95	364			
			Kabupaten Kediri	56	27	0	0	0	5	27	25	21	4	4	2	25			
			Kabupaten Jember	82	42	0	0	0	23	42	29	18	11	11	13	29			
			TOTAL	905	528	2	0	0	122	526	416	314	102	104	110	418			
		Targeted	Surabaya	329	192	0	0	0	41	192	149	110	39	39	43	149			
			Kabupaten Kediri	24	12	0	0	0	3	12	9	8	1	1	3	9			
			Kabupaten Jember	35	18	0	0	0	9	18	16	10	6	6	2	16			
			TOTAL	388	222	0	0	0	53	222	174	128	46	46	48	174			
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		1293	750	2	0	0	175	748	590	442	148	150	158	592			
6	Rokok	Targeted	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Kediri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTAL	Random	Surabaya	1838	1081	2	0	0	155	1079	849	713	136	138	230	851	713	851	83,78%
			Kabupaten Kediri	136	61	0	0	0	9	61	51	44	7	7	10	51	44	51	86,27%
			Kabupaten Jember	196	99	0	0	0	31	99	70	53	17	17	29	70	53	70	75,71%
			TOTAL	2170	1241	2	0	0	195	1239	970	810	160	162	269	972	810	972	83,33%
		Targeted	Surabaya	683	360	0	0	0	62	360	262	203	59	59	98	262	203	262	77,48%
			Kabupaten Kediri	51	26	0	0	0	3	26	19	18	1	1	7	19	18	19	94,74%
			Kabupaten Jember	74	36	0	0	0	11	36	30	22	8	8	6	30	22	30	73,33%
			TOTAL	808	422	0	0	0	76	422	311	243	68	68	111	311	243	311	78,14%
	TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK		Surabaya	2521	1441	2	0	0	217	1439	1111	916	195	197	328	1113			
			Kabupaten Kediri	187	87	0	0	0	12	87	70	62	8	8	17	70			
			Kabupaten Jember	270	135	0	0	0	42	135	100	75	25	25	35	100			
			TOTAL	2978	1663	2	0	0	271	1661	1281	1053	228	230	380	1283			
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Surabaya	770	393	0	0	0	66	393	352	284	68	68	41	352	284	352	80,68%
			Kabupaten Kediri	60	28	0	0	0	7	28	25	24	1	1	3	25	24	25	96,00%
			Kabupaten Jember	89	42	0	0	0	1	42	35	33	2	2	7	35	33	35	94,29%
			TOTAL	919	463	0	0	0	74	463	412	341	71	71	51	412			
		Targeted	Surabaya	206	56				0	56	44	38	6	6	12	44	38	44	86,36%
			Kabupaten Kediri	20	13				5	13	10	8	2	2	3	10	8	10	80,00%
			Kabupaten Jember	28	8				1	8	6	6	0	0	2	6	6	6	100,00%
			TOTAL	254	77	0	0	0	6	77	60	52	8	8	17	60			
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		1173	540	0	0	0	80	540	472	393	79	79	68	472			

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni												CAPAIAN INDIKATOR RAPK		
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	RAPK s,d Juni (Jan-Juni)		
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*				pembilang	Penyebut	capaian
2	Fortifikasi	Targeted	Kabupaten Kediri	0						0	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!
			Kabupaten Jember	0						0	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	134	115	0	0	0	34	115	95	81	14	14	20	95			
	TOTAL PANGAN	Random		919	463	0	0	0	74	463	412	341	71	71	51	412			
		Targeted		388	192	0	0	0	40	192	155	133	22	22	37	155			
		TOTAL		1307	655	0	0	0	114	655	567	474	93	93	88	567			

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	April			Mei			Juni		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	5	2		34	31		49	49	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	5	3		11	11		19	21	
		Suplemen Kesehatan	0	0		3	2		1	2	
		Kosmetik	0	0		6	5		9	9	
		Pangan	22	16		39	32		52	58	
		Total	32	21	88,49	93	81	87,93	130	139	94,75
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	1		3	2		2	2	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		1	1	
		Kosmetik	0	0		0	0		1	1	
		Pangan	1	1		0	0		0	0	
		Total	2	2	100,00	3	2	95,65	4	4	96,30
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0		1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		7	7	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		6	6	
		Kosmetik	0	0		0	0		6	6	
		Pangan	0	0		1	1		0	0	
		Total	0	0	0	1	1	100,00	20	20	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		1	1		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		2	2		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		1	1		0	0	
		Kosmetik	0	0		1	1		1	0	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	5	5	100,00	1	0	91,67
TOTAL			34	23	96,16	102	89	95,90	155	163	95,68

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	April		Mei		Juni		Total		RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	2	7	31	9	49	10	113	58	58	113	51,3274336
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	2	11	2	21	5	44	9	9	44	20,4545455
		Suplemen Kesehatan	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0
		Kosmetik	0	1	5	1	9	3	18	8	8	18	44,4444444
		Pangan	16	15	32	16	58	27	160	79	79	160	49,375
		Total	21	25	81	28	137	45	337	154	154	337	45,70
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	0	2	2	3	14	13	13	14	92,8571429
		Total	0	0	0	2	2	3	14	13	13	14	92,86
TOTAL			21	25	81	30	139	48	351	167			69,28

4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	April			Mei			Juni			Total			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	809	809	618	797	797	646	964	964	908	5076	5076	4512	4512	5076	88,89
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	699	699	699	373	373	373	675	675	672	3843	3843	3824	3824	3843	99,51
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	36	36	36	18	18	18	21	21	21	146	146	146	146	146	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	1	2	2	0	0	0	2	0	0	6	4	4	4	6	66,67
	Total		1545	1546	1355	1188	1188	1037	1662	1660	1601	9071	9069	8486	8486	9071	93,55

5. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	April			Mei			Juni			Total			RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	36	13	1	0	1	1	1	0	3	3	0	8	6	2	8			
2	Industri Bahan Baku Obat	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)		2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1			
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	15	7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	3	2	5			
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	69	26	4	2	2	3	0	3	2	2	0	16	8	8	16			
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	6	0	0	0	1	1	0	2	2	0	4	4	0	4			
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	27	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1			
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan			0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2			
11	Industri Kosmetik	92	46	3	3	0	7	3	4	4	4	0	26	17	9	26			
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Industri Pangan	900	296	28	21	7	44	21	23	41	29	12	180	106	74	180			
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	28286	31	2	0	2	4	0	4	1	0	1	14	0	14	14			
	Surabaya	29459	440	39	26	13	61	27	34	55	42	13	257	147	110	257	147	110	57,20

6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	April			Mei			Juni			Total			RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	296	80	9	6	3	8	5	3	16	10	6	55	38	17	55	38	17	
2	Apotek	**3173**	42	4	2	2	6	4	2	9	4	5	33	13	20	33	13	20	
3	Toko Obat	**248**	20	2	0	2	3	1	2	5	5	0	14	6	8	14	6	8	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	28	28	3	2	1	4	4	0	5	5	0	18	14	4	18	14	4	
5	Rumah Sakit (RS)	**299**	40	6	4	2	7	5	2	11	7	4	24	16	8	24	16	8	
6	Puskemas	**677**	52	4	3	1	5	4	1	13	10	3	31	25	6	31	25	6	
7	Klinik	**824**	51	6	3	3	11	5	6	11	7	4	33	17	16	33	17	16	
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	677	150	17	11	6	25	17	8	28	13	15	91	51	40	91	51	40	
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan		95	14	13	1	14	14	0	14	14	0	47	45	2	47	45	2	
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	443	130	13	9	4	20	13	7	23	21	2	79	62	17	79	62	17	
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)		36	0	0	0	9	4	5	4	1	3	18	6	12	18	6	12	
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	1120	50	6	1	5	2	1	1	9	7	2	37	19	18	37	19	18	
	Surabaya	7785	774	84	54	30	114	77	37	148	104	44	480	312	168	480	312	168	65,00

7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)					
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	17	17		10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April						20	20	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB.	40%	70%	Maret-Oktober					2,35	11,76	14,12	30,59
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November							3,53	7,06
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan						2,5	2,5	5
								0	10	12,35294118	44,26470588	50,15	72,65
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	33	33	10	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret					40	40	40	40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November				10,91	40	40	40	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November								
Total Progres								10	20,90909091	90	90	90	90
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	85	85	3,53	6,47	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei						20	20	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-							6,59	10,82
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November							4,94	6,12
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember								
Total Progres								3,53	6,47	10	30	41,53	46,94
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						135	135	4,51	12,46	37,45	54,75	60,56	69,86

8. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (91,77)

TOTAL RESPONDEN : 223

Indeks Total

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	90.37	3.61
Pemahaman	90.92	3.64
Manfaat	93.83	3.75
Minat	88.57	3.54
Indeks	91.77	3.67

Indeks Kegiatan

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Televisi	90.36	3.61
Radio	91.67	3.67
Brosur, majalah, koran	87.35	3.49
Videotron / Billboard	88.41	3.54
Transportasi Umum	92.24	3.69
Bioskop	92.86	3.71
Media Online	90	3.6
Talkshow Televisi	91.25	3.65
Talkshow Radio	93.75	3.75
CFD	90.52	3.62
Pameran	87.5	3.5
Penyuluhan	94.48	3.78
Media Sosial	88.49	3.54
Virtual	90.58	3.62

9. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)					
						s.d Januari	s,d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan	20,00	Jan - April	34	76	0,00	3,33	10,00	20,00	20,00	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,41
3	Bimbingan teknis keamanan pangan	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pembentukan Tim Keamanan										
	- Intervensi Keamanan Pangan										
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pengawalan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
	Total skor (Tahun N)	**100,00**		**34**	**76**	0,00	3,33	10,00	20,00	23,07	40,01

10. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)					
						Januari	s.d	sd	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	9	28	0,00	3,33	10,00	20,00	20,00	20,00
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15,00	April-Juli			0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	11,67
4	Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10,00	re: Mei-Oktober- Post Noven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan	10,00	November-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
9	Pengawalan	10,00	Juni-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**100,00**		**9**	**28**	**0,00**	**3,33**	**10,00**	**26,67**	**26,67**	**41,67**

11. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)					
						Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Advokasi	20,00	Januari-April	6	18	0,00	3,33	10,00	20,00	20,00	20,00
2	Survei Pasar	5,00	Januari-April			0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	15,00
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00
5	Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kampanye	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pengawalan	10,00	Februari-Oktober			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	Total	**100,00**		**6**	**18**	**0,00**	**3,33**	**10,00**	**40,00**	**52,50**	**65,00**

12. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	KOMODITI	UPT	April				Mei				Juni			
			Jumlah Sampel Rutin Sby dan Balai lain	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling) Screen reader	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel Rutin Sby dan Balai lain	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling) Screen reader support enabled.	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel Rutin Sby dan Balai lain	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling) Screen reader support	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar
1	Obat	Surabaya	126	124	84	84	45	42	81	81	99	92	93	93
2	Obat tradisional	Surabaya	129	129	58	58	40	40	61	61	59	59	60	60
3	Obat Kuasi	Surabaya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Suplemen Kesehatan	Surabaya	31	31	14	14	9	9	13	13	7	7	15	15
5	Kosmetika	Surabaya	215	207	128	128	67	60	111	111	166	164	129	129
6	Rokok	Surabaya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Obat	TOTAL SURABAYA	501	491	284	284	161	151	266	266	331	322	297	297
		total kumulatif		786		1.104		937		1.370		1.259		1.667
						36,96				45,11				57,22
7	Pangan	Surabaya	119	119	118	118	133	133	78	78	77	71	71	71
8	Fortifikasi	Surabaya			20	20			-	-			20	20
	Total Makanan SURABAYA		119	119	138	138	133	133	78	78	77	71	91	91
				342		486		475		564		546		655
						37,43				46,97				54,29

13. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

Tahapan	Juni										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	11	4	7		1,00		0,15	15,00%	39,06%	80,00%	31,25%
Tahap I				1	0,13	0,33	0,4	13,75%			
P21			1	1	0,13	0,25	0,3	8,44%			
Tahap II				2	0,00	0,17	0,15	1,88%			
Total	11	4	8	4							

14. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW II		
	April	Mei	Juni
total_akun_individu	141	141	141
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_aktif	123	139	119
total_individu_login	123	139	119
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	26,17	29,57	25,32
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	26,17	29,57	25,32
Perhitungan (%)	92,34	99,14	90,64
Perhitungan per TW	95,12	95,92	95,04
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW II		
Aktifitas	April	Mei	Juni
Akses BCC	60	60	60
Login BCC	40	40	40
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW II		
Aktifitas	April	Mei	Juni
Jumlah Akses	255	245	275
Perhitungan	356	333,8	324
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	April	Mei	Juni
Jumlah Upload	12	12	25
Jumlah Viewer	1826	699	1292
Perhitungan Rata2 Berita	10,5	10,8	13,17
Perhitungan Rata2 Pengunjung	306,67	251,46	188,24
Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW II		
Aktifitas	April	Mei	Juni
Jumlah Entry	85	59	63
Jumlah Verifikasi	85	59	63
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks per TW	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Penilaian	April	Mei	Juni
% Sarana	34,1	64,65	54,86
% Sampling	103,11	100,44	106,42
% Pengujian			
Rata-Rata	68,61	82,55	80,64
Indeks per Bulan	1	2	2
Komposit SIPT	0,8	1,6	1,6

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks	April	Mei	Juni
Indeks Pemanfaatan	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	1,4	2,2	2,2
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,2	2,6	2,6

15. NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai IKPA

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	77.51	100.00	100.00	99.10	100.00	92.68	93.58	100%	93.58
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	10.00	15.50	10.00	10.00	9.91	5.00	23.17			
	Nilai Aspek	100.00		95.32					92.68			

Nilai EKA

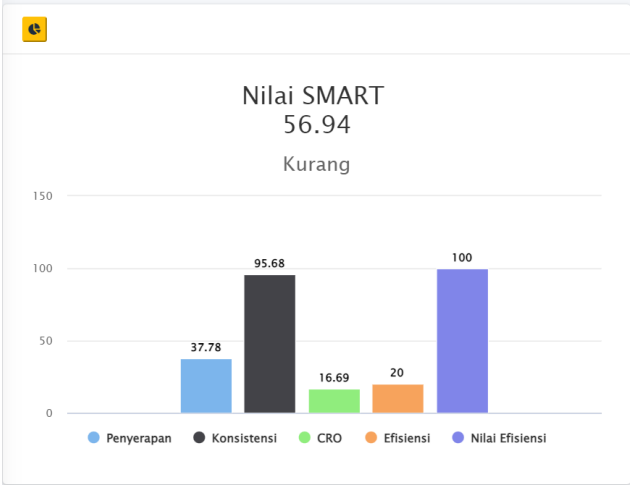

Nilai EKA tw 2, per 11 Juli 2022 = 56,94 x 60% = 34,16
Nilai IKPA = 93,58 x 40% = 37,43

Nilai Kinerja Anggaran = 34,16 + 37,43 = 71,60